

Buletin La'ó Hamutuk

Vol. 9, No. 1

Januari 2008

Program Penggiatan Masyarakat Oecusse

Program Penggiatan Masyarakat Oecusse atau *Oecusse Community Activation Programme* (OCAP) didanai oleh Komisi Eropa (EC) dan Program PBB untuk Pembangunan (UNDP), yang dalam penerapannya dilaksanakan oleh Kantor Pelaksanaan Proyek PBB (UNOPS) yang bekerja-sama dengan Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan (MAP), Kementerian Ekonomi dan Pembangunan (MED) dan Pemerintahan Distrik Oecusse. Tujuan OCAP ialah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan dan upaya tersebut merupakan bagian dari Program Pembangunan Pedesaan di Timor-Leste yang didanai oleh Komisi Eropa. Komisi Eropa juga mendanai beberapa proyek lainnya (lihat *Buletin LH* Vol. 6 No. 5).

Dalam pengimplementasian program OCAP, UNDP melibatkan pemerintah Timor-Leste sebagai mitra dalam pengambilan kebijakan umum di tingkat nasional maupun distrik. Sedangkan kebijakan pengalokasian dana dalam penerapan program dikendalikan oleh UNDP dan UNOPS. Pada tanggal 20 Mei 2002 secara resmi Pemerintah Timor Leste menandatangani kesepakatan kerja-sama dengan UNDP. Program OCAP diyakini dapat memberdayakan masyarakat lokal sehingga mereka terlibat secara aktif

dalam proses pembangunan. Sejauh ini, OCAP sudah mencapai separuh dari tujuan tersebut, akan tetapi masih banyak hal yang perlu dibenahi.

Program yang berjangka-waktu lima tahun ini dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan di dalam negeri, sebagaimana telah dicantumkan di dalam Rencana Pembangunan Nasional, melalui penyediaan pasokan makanan yang berkelanjutan bagi masyarakat Oecusse. Guna mencapai tujuan di atas, program ini bermaksud memberdayakan masyarakat setempat dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka dan selanjutnya merencanakan dan menerapkan kegiatan pembangunan agar membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan peningkatan sumber-pendapatan.

Artikel ini membahas tentang OCAP sebagai suatu program bantuan berjangka-panjang dari Komisi Eropa untuk mengurangi kemiskinan dan membangun tersedianya pangan yang berkesinambungan di daerah pedesaan di Oecusse. Data untuk artikel ini diperoleh dari Komisi Eropa, UNDP, UNOPS, dan Kementerian Pembangunan dan Pertanian Timor-Leste. *La'ó Hamutuk* mengunjungi Oecusse dua kali dengan lama masing-masing empat hari pada bulan Maret dan Oktober 2007, mewawancarai masyarakat lokal di daerah kegiatan OCAP. Dalam bulan Maret kami mengunjungi delapan desa, dan pada bulan Oktober kami mengunjungi 13 desa: Costa, Nipani, Lifau,

(bersambung ke halaman 2)



Sebuah contoh kegiatan OCAP: Pembibitan di Desa Naimeco telah kering. Oktober 2007.

Daftar isi . . .

Pengumuman Lowongan Kerja	11
PWYP mengonsolidasi gerakan Asia-Pasifik	12
Grup Serbisu EITI iha Timor-Leste	15
Karta ba ONU kona ba UNMIT no justisa	19
Program Pemerintah dalam bidang Pertanian	21
Editorial: Bank Dunia merekomendasikan Jalan Neo-Liberal, lagi	24

La'ó Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-Leste

P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste

Mobile +(670)7234330

Telepon +(670)3325013

Email: info@laohamutuk.org

Situs/Web: www.laohamutuk.org

Cunha, Bobokase, Bobometo, Lalisuk, Naimeko, Taiboco, Suni Ufe, Abani, Usitacae dan Usitaqueno.

Informasi dalam artikel ini diperoleh dari pertemuan-pertemuan itu, dengan informasi tambahan lainnya yang diberikan atas kebaikan dari banyak pihak dan organisasi, termasuk José Reinaldo Soares da Silva, Manajer Program Nasional OCAP; Koen Toonen, Koordinator Program OCAP; Merita Marques, Koordinator Dana Pengembangan Masyarakat (CDF); Jitendra Prasad, spesialis pada bidang pertanian OCAP; Angelo Siti, Departemen Kehutanan pada Kementerian Pertanian dan Perikanan di Oecusse; Cristodio Bobo, Departemen Perikanan pada MAP di Oecusse; Sabino Freitas, Departemen Irigasi MAP di Oecusse; Jose Suni, Kementerian Pekerjaan Umum, Pelayanan Air dan Kesehatan Lingkungan di Oecusse; Fransisco Marques, Administrator Distrik Oecusse; FFSO (Fundasaun Fatu Sinai Oecusse); Pusat Perempuan Enklave Oecusse (CFEO); Oxfam Australia; dan Palang Merah Timor-Leste.

Tujuan OCAP dan penerapannya

Konsep program ini pada awalnya didiskusikan pada tahun 2001 dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh UNDP, yang juga melibatkan sejumlah pemimpin masyarakat sosial dan madani Oecusse. Pertemuan tersebut dipandang sebagai konsultasi publik guna merumuskan tujuan pembangunan daerah, prosedur dan berikut sejumlah program pengimplementasiannya. Didasarkan pada lokakarya ini, UNDP merancang OCAP dan melobi sejumlah Negara donor untuk menyediakan dana bagi pelaksanaan program tersebut. Pada tahun 2003, UNDP dan Komisi Eropa menandatangani sebuah kesepakatan kerja-sama, dan UNDP, dalam kerja-samanya dengan Pusat Penelitian Nasional Universitas Nasional Timor-Leste, mengajukan program ini kepada Pemerintah Timor-Leste guna mendapatkan masukan dari berbagai kementerian terkait.

Sebelum program tersebut diterapkan, berbagai kampanye dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat Oecusse yang tersebar di 18 desa mengenai tujuan, program dan prosedur OCAP. Menurut informasi yang kami dapat dari UNDP, mengatakan bahwa kampanye ini menyertakan juga aparat dari Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrator Distrik Oecusse dan aparat terkait lainnya. Orientasi penerapan program ini dilaksanakan pada bulan April 2004, dan sosialisasi untuk program dilaksanakan padabulan November 2004. Para pemimpin pemerintahan setempat dan masyarakat berperan-serta dalam proses sosialisasi tersebut.

Pada bulan November 2004, OCAP mulai merekrut staf dan melatih mereka sesuai dengan misi dan tujuan program itu dan cara pengelolaannya. Para staf yang baru melakukan magang selama empat hari di Program Penggiatan Masyarakat Ainaro-Manatuto (AMCAP, mirip dengan OCAP), dan Manajer Program Nasional magang selama seminggu. Selanjutnya, staf program dan para fasilitator dikirim ke India pada tahun 2004 guna mempelajari konsep Kelompok Swadaya (*Self-Help Groups* – SHGs), termasuk pelatihan dan kemah akan

kesadaran, dari MYRADA. MYRADA sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan program pembangunan pedesaan di tiga negara bagian India, yang juga memberikan bantuan terus-menerus, termasuk mengirimkan para stafnya ke enam negara bagian lainnya. Organisasi ini juga mempromosikan Kelompok Swadaya di Kamboja, Burma dan Bangladesh.

Pada Mei 2005, UNDP mulai melaksanakan program berjangka lima tahun tersebut, yang akan berakhir pada bulan Mei 2009. Dalam tahun pertama pelaksanaannya, lima desa – Naimeko, Malelat, Cunha, Beneufe dan Oemolo – terpilih sebagai proyek percontohan guna menakar kebutuhan masyarakat lokal, prioritas berikut perencanaan mereka di bidang pembangunan pedesaan. Tahap selanjutnya ialah pembentukan Kelompok Swadaya di desa-desa tersebut guna meningkatkan produksi pangan dan pendapatan. Menjelang akhir tahun 2006, kegiatan OCAP diterapkan di 18 desa Oecusse.

OCAP memiliki empat komponen penting:

1. Penggiatan masyarakat

Program ini membantu memperdayakan anggota masyarakat guna memahami dan memprioritaskan kebutuhan mereka agar selanjutnya merencanakan serta mengimplementasikan kebutuhan mereka untuk keuntungan masyarakat pedesaan. Program itu sendiri selanjutnya memiliki empat sub-komponen:

- √ Pembentukan dan mobilisasi kelompok Swadaya (SHGs)
- √ Dukungan terhadap pemberdayaan kaum perempuan
- √ Upaya simpan-pinjam masyarakat, dan
- √ Dana Pembangunan Masyarakat (CDF)

Sub-komponen yang pertama adalah sebuah mekanisme untuk mengimplementasikan sub-komponen lainnya. Selain itu, sub-komponen itu juga berlaku sebagai upaya untuk mengembangkan strategi bagi program-program lokal. Masing-masing Kelompok Swadaya terdiri dari 15 hingga 20 orang miskin pedesaan, yang memiliki kepentingan sama dalam hal simpan-pinjam uang dan partisipasi sosial.

2. Pengembangan pertanian

Komponen ini memperdayakan para petani lokal untuk meningkatkan kualitas ternak mereka, termasuk pengelolaan irigasi. Bagian ini memiliki dua sub-komponen penting:

- √ Peningkatan mutu ternak, yang termasuk di dalamnya adalah penggemukan ternak, penyediaan rumput bagi ternak dan lain sebagainya
- √ Peningkatan pertanian di daerah dataran rendah dan tinggi yang meliputi produksi sayur-mayur, padi, pengembang-biakan benih, irigasi, penadahan air, proses pembibitan benih, pembuatan kompos, pengelolaan kuman, pertanian dengan sistem terasering dan teknologi tanah pertanian.

3. Studi teknis dan kelayakan

Komponen ini mengidentifikasi peluang pembangunan ekonomi dan sosial melalui peningkatan perdagangan

lintas-batas dan pasar. Berbagai studi kelayakan mengenai pembangunan ekonomi dan sosial dapat membantu masyarakat memahami situasi mereka agar dapat meningkatkan pendapatan mereka, termasuk mengidentifikasi layanan infrastruktur dan sosial lainnya pada tingkat komunitas yang dapat diakses.

4. Dukungan bagi pengembangan kapasitas pemerintah lokal

Pengembangan kapasitas pemerintahan lokal diarahkan pada pemerintahan distrik, aparat Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Oecusse serta staf program. Komponen ini dirancang untuk memberi peran pada pemerintah lokal agar terlibat di dalam proses OCAP, dan untuk meningkatkan dukungan dari para pemimpin masyarakat, staff OCAP di tingkat distrik dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pembentukan dan penggiatan Kelompok-kelompok Swadaya (SHGs)

Menurut Koordinator Program OCAP, Koen W. Toonen, sedikitnya ada 241 Kelompok Swadaya yang telah dibentuk, termasuk 65 kelompok perempuan, 70 kelompok laki-laki dan sekitar 106 kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Terdapat sekitar 1670 laki-laki dan 1945 perempuan yang tersebar di berbagai Kelompok-kelompok Swadaya tersebut.

Pada tahun 2007, OCAP mulai mengevaluasi dan menilai berbagai hal yang telah ditempuh oleh Kelompok-kelompok Swadaya tersebut. Pada tahun 2008, mereka berencana membangun sebuah federasi SHGs sebagai organisasi payung dari berbagai organisasi itu.

Akan tetapi, se usai mengadakan kunjungan di 13 desa, *La'o Hamutuk* menemukan bahwa hanya kelompok simpan-pinjam yang hingga kini masih aktif. Kelompok lainnya tidak berfungsi kembali; beberapa diantaranya hanya tinggal namanya karena sebagian anggota mereka terlibat dalam kegiatan lainnya. Di desa Lalisuk, misalnya, tiga kelompok dibentuk untuk memelihara ayam, dua kelompok untuk simpan-pinjam, sementara empat kelompok lainnya bergerak di bidang hortikultura. Hingga



Oktober 2007, Kandang pemeliharaan ayam di Naimeco. Tidak pernah digunakan sejak bulan Maret.

sekarang hanya kelompok simpan-pinjam yang masih aktif sementara kelompok lainnya gulung tikar karena mereka telah berhenti memelihara ternak dan menanam sayuran sejak tahun 2006. Salah satu alasan mengapa bagian simpan-pinjam masih aktif ialah karena para anggota ingin mendapatkan pinjaman dari tabungan kelompok. Hal yang sama terjadi di desa Naimeko yang terdiri dari empat kampung (*aldeia*), yang berhasil membentuk 12 kelompok. Satu kelompok bubar sementara kelompok lainnya masih ada untuk melakukan sistem simpan-pinjam. Kami memperoleh hasil serupa di desa lainnya. Di suku Abani, misalnya, kelompok-kelompok yang ada menanam sayuran karena mereka memiliki air yang cukup.



Oktober 2007, Kandang pemeliharaan sapi di Lifau. Tidak pernah digunakan sejak bulan Maret.

La'o Hamutuk yakin bahwa OCAP mestinya tidak membentuk begitu banyak kelompok yang tidak efektif, dan bahwa program yang ada seharusnya mencerminkan kebersinambungan dan keragaman, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat belajar dari satu sama lain.

Dana Pembangunan Masyarakat

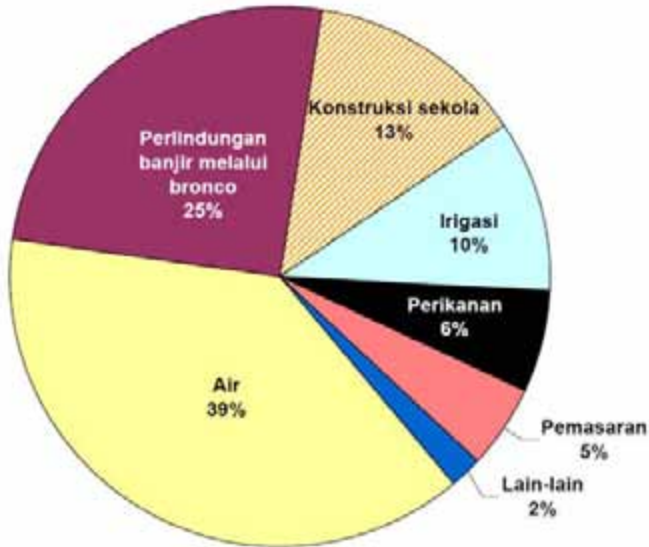
Menurut UNDP, OCAP telah mengalokasikan dana kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk:

- √ Layanan-layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas kesehatan lingkungan, akses jalan- raya dan jembatan di tingkat kampung, rekonstruksi, rehabilitasi sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dan pengairan.
- √ Pelatihan termasuk pelatihan jangka-pendek di bidang pertanian, tabungan masyarakat, dan hal-hal yang berkaitan erat dengan jender, etc.

Dana Pembangunan Masyarakat (CDF) memberikan hibah untuk kegiatan tingkat desa, untuk mewujudkan tujuan tersebut para Fasilitator Pembangunan Masyarakat yang ditempatkan di setiap desa untuk bekerja-sama dengan masyarakat membentuk suatu kelompok masyarakat yang merancang sendiri rencana dan berikut anggarannya yang didanai oleh CDF. Usulan anggaran tersebut selanjutnya dinilai oleh Komisi Kerja Program (PWC) tingkat distrik. Berdasarkan rekomendasi dari PWC, keputusan untuk mendanai proposal itu ditempuh UNOPS dan UNDP.

CDF Mengesahkan Proposal

Tahun Anggaran 2006/2007
(Anggaran \$200,000)



Proposal yang telah disahkan TA 2006/2007. Di jumlahkan, 25 dari 45 proposal yang disahkan dibawah anggaran \$200,000. Grafik ini menunjukkan seberapa besar dana yang dialokasikan untuk setiap kategori.

Sementara proposal yang membutuhkan anggaran lebih dari \$US 30.000 atau lebih harus disetujui oleh kantor UNOPS di Bangkok, Thailandia.

UNDP mengatakan, bahwa dia membutuhkan seminggu setelah proposal diserahkan, uang untuk program tersebut baru tersedia. Bila suatu proyek fisik masyarakat, seperti irigasi atau sekolah, yang membutuhkan ketrampilan teknis dalam pelaksanaannya, OCAP biasanya memperlakukan proses tender kepada para kontraktor melalui suatu tender terbuka yang juga menuntut agar masyarakat memberikan sekitar 10% dari uang, materi atau tenaga kerja yang ada.

Pada pertemuannya di bulan Oktober 2006 PWC mengesahkan panduan bagi kegiatan CDF, dan sedikitnya 45 proposal untuk pembangunan komunitas diserahkan didanai oleh CDF. Dua puluh lima proposal memenuhi panduan yang ada dan selanjutnya disahkan agar diimplementasikan. PWC selanjutnya mengesahkan suatu rencana kerja dan sekitar \$200.000 dana disediakan untuk CDF untuk tahun anggaran 2006/2007.

Akan tetapi, kepala desa Nipani dan Bobokase menginformasikan kepada kami bahwa mereka menyerahkan proposal untuk penyediaan air bersih kepada OCAP pada tahun 2005, tetapi tidak mendapat satu pun respons hingga Oktober 2007. Mereka berangkat menuju kantor OCAP di Oecusse, tetapi mereka hanya disuruh menunggu dan sabar. Koordinator CDF dari OCAP, Merita Marques, memberitahukan *La' o Hamutuk* bahwa sumber air tersebut sungguh dalam di dalam tanah dan untuk itu proposal tersebut membutuhkan dana yang besar untuk membangun sarana fasilitas air bersih, saat ini pihaknya masih berusaha menyikapi isu tersebut.

Kepala desa Nipani memberitahu kami bahwa tiga proposal yang diusulkan oleh desanya tidak ada yang berhasil.

Belakangan OCAP memberitahu mereka bahwa proposal untuk air bersih tersebut dikirim kepada Palang Merah Timor-Leste untuk diimplementasikan. Koordinator Palang Merah, Domingos Tapen, memberitahu bahwa dia telah menerima proposal itu tetapi mereka hanya dapat memberikan dukungan teknis, bukan pendanaan, karena mereka memiliki prioritas lain.

Alasan lain dari tertundanya proposal masyarakat tersebut ialah karena CDF sering hanya memberikan panduan singkat mengingat panduan mereka baru disahkan pada bulan Oktober 2006.

La' o Hamutuk yakin bahwa sistem birokrasi pendanaan OCAP yang berbelit menghambat sejumlah kebutuhan mendasar sebelum program ini berakhir. Jika dana CDF dimaksudkan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat secara efektif, OCAP seharusnya mengesahkan proposal tersebut secepatnya dan agar lebih efektif memberikan informasi kepada masyarakat seputar proses tersebut.

Pemberdayaan kaum perempuan

Program ini dirancang khusus untuk membantu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kaum perempuan agar mereka dapat meningkatkan kerja dan pendapatan mereka. Melalui Kelompok-kelompok Swadaya, program ini memberikan pelatihan di bidang tata-buku, pengelolaan keuangan, simpan-pinjam masyarakat, dan kepemimpinan. Selain mendapatkan pelatihan, kaum perempuan juga mengorganisir diri kedalam beberapa kelompok antara lain kelompok tanaman sayur-mayur, peternakan, dan simpan-pinjam. Kelompok-kelompok Swadaya (SHGs) telah meningkatkan sejumlah kaum perempuan yang terlibat di dalam peningkatan pendapatan dan pengimplementasian program simpan-pinjam dan kredit.

Saat *La' o Hamutuk* mengunjungi 13 desa, kelompok-kelompok di atas telah tidak aktif lagi. Kelompok hortikultura dan peternakan telah berhenti bekerja pada bulan November 2006. Hal ini disebabkan karena mereka gagal menanam sayur-sayuran di musim hujan dan banyak ternak mereka mati karena terserang penyakit. Datangnya musim kemarau memperburuk situasi pengadaan air. Kendati OCAP menyediakan satu tanki air dan reservoirnya, hal itu tidak dapat membantu banyak di musim kemarau.

Kaum perempuan yang telah lama aktif dalam berbagai kelompok itu umumnya memiliki kesan positif mengenai program-program OCAP. Namun, mereka hanya mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas dari berbagai pelatihan yang diberikan. Kami merekomendasikan agar pelatihan serupa ditingkatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka seperti kesehatan, pendidikan dan jender.

La' o Hamutuk juga menyarankan agar OCAP mempersiapkan beraneka-ragam kegiatan alternatif agar organisasi itu tetap berjalan, apabila mereka gagal melaksanakan kegiatan awal mereka. Selanjutnya, sejumlah tindakan pencegahan bisa dilakukan untuk mengatasi rintangan tersebut sehingga kelompok tersebut tidak mengalami kerugian finansial dan kemacetan dalam menjalankan kegiatan itu.

Tabungan yang dimiliki masyarakat dan Skema Kredit

OCAP juga membentuk skema tabungan dan kredit agar memudahkan pinjaman kredit kecil di tingkat masyarakat dan untuk menyediakan sejumlah pelatihan yang sesuai serta panduan standard yang cocok dengan konteks lokal. Kelompok yang terlibat mengadakan pertemuan setiap bulan guna membahas simpan-pinjam mereka serta kegiatan terkait lainnya. Setiap kelompok memiliki seorang ketua, bendahara dan sekretaris. Masing-masing kelompok dapat memutuskan jumlah uang yang akan dipinjam oleh setiap orang, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhannya. Kelompok tersebut juga dapat menetapkan kriteria misalnya hanya anggota yang berhak meminjam uang atau peminjam berkewajiban membayar bunga setiap bulan.

Suku-bunga dan jadwal pembayaran ditentukan oleh kelompok karena uang yang ada dimiliki oleh kelompok. Peminjam harus mengembalikan sejumlah persentase dari uang pinjaman setiap bulan sehingga dana tersebut dapat diteruskan kepada anggota lainnya. Jika seorang anggota mengundurkan diri dari kelompok, ia hanya akan mendapatkan kembali 50% dari tabungannya sementara sisanya untuk kelompok.

Anggota-anggota SHG menghargai keuntungan dari berbagai kegiatan tersebut, menabung uang mereka sendiri untuk selanjutnya digunakan untuk mereka sendiri tanpa harus meminjam uang dari orang lain. Akan tetapi, sejumlah kelompok memberitahu *La' o Hamutuk* bahwa mereka bingung akan penggunaan uang karena jumlah anggota mereka semakin banyak.

La' o Hamutuk yakin bahwa program ini adalah kegiatan OCAP yang paling sukses; nyatanya hanya program ini yang berjalan lancar. Dalam hal ini, OCAP hanya menyediakan kemudahan dan pelatihan mengenai tata-buku dan manajemen, sementara proses simpan-pinjam sendiri dipercayakan kepada masing-masing kelompok. Data dari UNDP menunjukkan bahwa selama 2006/7, jumlah semua tabungan dari kelompok yang aktif sebesar US\$36.820, dan jumlah uang yang dipinjam mencapai \$23.820, dengan pembayaran suku-bunga sekitar \$2.331.

Dalam bulan Februari 2007, OCAP bersama dengan Pusat Pelatihan Bisnis dan Pelatihan Ketrampilan yang Siap Pakai (STAGE) di Oecusse melakukan suatu penilaian bersama dan pelatihan bisnis untuk 13 Kelompok Swadaya di desa Malelat, Abani, Naimeko, Bobokase, Usitaqueno dan Bobometo. OCAP juga bekerja-sama dengan BNU dan program microfinance *Moris Rasik* di Oecusse untuk membantu SHG mengelola program simpan-pinjam dan kredit mereka.

Demi kelanjutan program ini, *La' o Hamutuk* berpendapat bahwa mekanisme untuk menyelamatkan simpan-pinjam dan untuk juga meningkatkan rasa percaya di dalam kelompok, harus benar-benar dipertimbangkan. Kegiatan simpan-pinjam ini dinilai sangat positif bagi masyarakat, karena selain prosedur sederhana dan ongkos minimal tidak melebihi kemampuan masyarakat. *La' o Hamutuk* mendukung didirikannya suatu serikat untuk semua SHG, yang akan membantu kegiatan simpan-pinjam agar

semakin berkelanjutan dan tetap setelah berakhirnya OCAP.

Peningkatan Kualitas Ternak

Melalui program peningkatan mutu ternak, para peternak dapat mendirikan Asosiasi Pemilik Ternak (*Cattle Owners Associations* atau COAs). OCAP mendatangkan sejumlah spesialis dari relawan PBB (UNV) di bidang produksi ternak guna melatih anggota COAs tentang ketrampilan dasar dan teknik pemeliharaan ternak serta meningkatkan mutu dan berat ternak. COAs mendirikan sejumlah kandang ternak dan menanam rumput Gajah untuk pakan ternak sementara OCAP sendiri menyediakan benih rumput Gajah, fasilitas air dan fasilitas timbangan ternak. Selama tiga bulan, ternak harus dikandangi agar pakan dan airnya dapat dipantau oleh COAs. Setiap peternak dapat menjual ternaknya dan menyimpan uang hasil penjualan ternak tersebut.

Saat *La' o Hamutuk* mengunjungi sebuah proyek percontohan penggembakan ternak di desa Oemolo pada bulan Maret 2007, kami menemukan bahwa kandang tersebut kosong dan terbengkalai. Tanaman rumput Gajah juga telah layu dan tank air untuk menyiram rumput Gajah pun sudah kering. Sebuah papan-nama bertuliskan "OCAP" yang berdiri di tengah-tengah lapangan. Setelah tujuh bulan berselang, situasi tersebut tidak berubah.



Oktober 2007, Rumput Gajah yang ditanam di Oemolo telah mati, hanya papan OCAP yang tertinggal.

Sapi pada awalnya ditempatkan di dalam kandang milik komunitas tetapi hingga kini masyarakat menggunakan kandang mereka sendiri agar lebih mudah merawat ternak mereka. Mereka juga menanam rumput Gajah di dekat rumah mereka masing-masing.

Akan tetapi situasi di desa Nipane agak berbeda. Rumput Gajah bertumbuh sangat baik sayangnya para peternak tidak menggunakan rumput Gajah sebagai pakan ternak mereka. Mereka malahan memilih daun turi sebagai makanan ternak dan daun lainnya yang mereka kenal. Mereka tidak memilih rumput Gajah yang tentangnya tidak banyak informasi yang mereka peroleh dan yang persediaannya agak terbatas. Ketika kami kembali mengunjungi tempat itu pada bulan Oktober, rumput Gajah telah layu karena kekurangan air dan perawatan. Menurut



Oktober 2007, Rumput Gajah yang ditanam di Nipane belum dipergunakan meskipun itu tumbuh dengan subur.

mereka, OCAP berjanji untuk membeli rumput mereka tapi hal itu tidak pernah terjadi. Anggota kelompok telah memutuskan untuk menanam kembali rumput Gajah di sekitar rumah dan menjaga ternak di sekitar rumah mereka.

Para petani lokal yang menanam rumput Gajah mengeluh bahwa OCAP tidak menghargai hasil kerja keras mereka, mereka merasa bahwa mereka telah menghabiskan uang, waktu dan sumber-daya lainnya untuk menanam rumput Gajah tapi sia-sia.

Berdasarkan pemantauan kami, *La'o Hamutuk* tidak yakin bahwa program ini efektif. Selanjutnya mekanisme kontrol OCAP yang tidak jelas telah menurunkan prakarsa dan kreativitas masyarakat lokal sehingga menyebabkan program tersebut tidak berkelanjutan.

Pertanian di dataran tinggi dan dataran rendah

Program OCAP ini adalah untuk meningkatkan produksi pangan, pendapatan dan gizi bagi masyarakat Oecusse. Program tersebut meliputi:

1. Pengenalan dan mempromosikan keanekaragaman yang cocok serta praktek budaya produksi pangan serta konservasi tanah dan air.

Dengan memperkenalkan keanekaragaman dan teknologi yang baru, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi jagung, padi dan kacang di dataran tinggi serta di dataran rendah. Di bawah program Pemilihan Keanekaragaman Partisipatoris, banyak jenis tanaman baru ditanam oleh para petani untuk dapat membandingkan hasilnya dengan keanekaragaman tanaman yang ada agar selanjutnya mereka dapat memilih keanekaragaman yang paling cocok untuk kondisi mereka. Keanekaragaman pilihan tersebut selanjutnya ditanam di sebuah wilayah yang lebih luas di bawah program Lahan Pertunjukan Partisipatoris, dan hasilnya terus diverifikasi. Jika ditemukan ada keanekaragaman yang cocok untuk daerah tertentu, keanekaragaman tersebut dipromosikan untuk selanjutnya dibudidayakan secara luas melalui program penggandaan benih dan ekstensifikasi.

Demikian juga halnya dengan berbagai teknologi untuk pengembangan kesuburan tanah (misalnya pembuatan

pupuk kompos, teknologi pertanian teras, dan tanaman multikultur) dan konservasi tanah dan air (misalnya proses penimbaan air, cara bercocok tanam yang berpindah-pindah, dan pengelolaan sumber air) tengah diterapkan untuk meningkatkan produksi dengan harapan bahwa keamanan pangan akan dicapai secara perlahan.

2. Mempromosikan komoditas hortikultural (sayur-mayur dan buah-buahan) dan pembenihan komunitas

Program ini meningkatkan teknologi produksi sayur-mayur (pengairan curah *drip irrigation*, konstruksi plot plastik, dan pembuatan pupuk kompos), melatih para petani untuk selanjutnya memilih jenis / keanekaragaman yang cocok yang dapat diolah untuk selanjutnya dipasarkan dan menghasilkan bibit pohon, tanaman keras dan buah-buahan di dalam pembenihan komunitas.

Selanjutnya, OCAP juga menyediakan benih bagi para petani lokal di daerah pegunungan seperti jambu, mangga dan pohon cemara. Benih-benih tersebut dirawat oleh SHGs, dan OCAP berjanji untuk membeli benih-benih yang sudah besar. *La'o Hamutuk* mengunjungi sebuah tempat pembibitan di desa Naimeko pada bulan Maret dan di sana kami menemukan bahwa banyak benih telah bertumbuh menjadi pohon sementara baik OCAP maupun masyarakat lokal tidak menggunakan pohon tersebut. Kelompok-kelompok Swadaya yang mengurus benih tersebut merasa kecewa karena mereka merasa bahwa OCAP telah memanipulasi mereka. Mereka menyampaikan kedongkolan mereka melalui suatu dialog dengan OCAP, tapi tak satu pun ada penyelesaian.

Akan tetapi, UNDP mengatakan bahwa OCAP tidak pernah berjanji untuk membeli benih dari tempat pembibitan dan tidak pernah berjanji untuk terlibat dalam pemasaran benih-benih tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa pesan ini disampaikan secara gamblang kepada para kelompok pada hari pertama dilaksanakannya program tersebut, walaupun OCAP membeli sejumlah benih dari *Sloping Agriculture Land Technologies* (SALT) dan program pengelolaan sumber air lainnya.

Dalam kunjungan kami yang terakhir di bulan Oktober, *La'o Hamutuk* menemukan kondisi yang meresahkan. Bibit tidak lagi ada karena kelompok-kelompok tersebut telah berhenti melakukan pembibitan dan telah mengembalikan uang simpanan kepada setiap anggota kelompok. Dewasa ini, mereka memfokuskan pada kegiatan pertanian di daerah pegunungan.

Situasi yang sama juga terjadi di desa Usitacae - Sifin. Benih yang telah ditanam pada bulan Oktober 2006 telah diterlantarkan karena tidak ada lagi air untuk menyirami benih tersebut dan para anggotanya kecewa karena OCAP tidak memenuhi janji untuk membeli benih mereka.

Menurut UNDP, dukungan OCAP terhadap pembibitan berlangsung hanya sekali dan selanjutnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan (MAP) seharusnya membantu kegiatan kelompok tersebut jika mereka mendapatkan pembeli. Dewasa ini, kelompok tersebut mendapatkan permintaan dari MAP dan tampaknya jelas bahwa para petani bibit akan menjual bibit mereka kepada MAP dan organisasi lainnya.

MAP mengatakan kepada *La'o Hamutuk* bahwa mereka berencana untuk membeli tiga jenis bibit seperti kelapa, jambu dan kemiri tetapi bukan jenis bibit lainnya. MAP juga mengatakan bahwa mereka juga akan melakukan pembibitan.

3. Pelatihan kepada masyarakat akan nilai gizi dari sayur-mayur dan menganjurkan masyarakat mengkonsumsinya

OCAP mendorong agar para petani sayur-mayur untuk mengonsumsi produk mereka sebanyak mungkin. Masyarakat telah setuju untuk memakan sayur-sayuran yang telah mereka tanam, sementara sisanya dijual di pasar.

Di sejumlah desa yang dikunjungi *La'o Hamutuk*, kegiatan-kegiatan masyarakat seperti penanaman sayur-mayur dan pembibitan mendapatkan sejumlah masalah karena kurangnya air.

La'o Hamutuk menyarankan agar OCAP memfasilitasi tersedianya air sebelum mengimplementasikan kegiatan mereka mengingat kebutuhan akan air sangat dibutuhkan.

La'o Hamutuk berpikir bahwa OCAP harus meninjau-kembali program ini bila mereka tidak ingin kehilangan kepercayaan masyarakat lokal yang merasa tidak diuntungkan dari program-program tersebut.

Dukungan terhadap program pemberdayaan

Menurut UNDP, program ini dirancang untuk memberdayakan program staf, masyarakat dan orang lain yang terlibat di dalam program tersebut seperti pemerintah daerah dan aparat MAP distrik Oecusse. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas untuk mempersiapkan rencana kerja, merancang program-program pelaksanaan dan berikut pengimplementasinya.

Fasilitator-fasilitator Kegiatan Masyarakat (CAFs) mendapatkan pelatihan di bidang organisasi masyarakat, SHGs, penelitian pertanian dan pembangunan, penilaian pedesaan partisipatoris (PRA) dan teknik pertanian lainnya, termasuk perbaikan pendapatan. Masing-masing desa seorang CAF sehingga terdapat sekitar 18 CAFs di seluruh Oecusse.

Akan tetapi, saat *La'o Hamutuk* mengunjungi sejumlah desa, kami mengetahui bahwa sebagian CAFs tinggal di kota Oecusse sehingga efektivitas dan proses dampingan mereka terhadap Kelompok-kelompok Swadaya di desa-desa tersebut sangat terbatas. CAF mengunjungi desa bila ada pertemuan di sana sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyikapi masalah yang dihadapi oleh kelompok di desa.

Salah seorang fasilitator mengakui bahwa terkadang mereka tidak mampu menyelesaikan masalah di dalam kelompok karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan tetapi hanya bertanggung-jawab untuk memfasilitasi proses OCAP yang pada akhirnya membuat mereka merasa tidak nyaman di dalam kelompok mereka sendiri. Kami juga tahu bahwa pihak-pihak di luar OCAP (seperti administrator distrik dan MAP) hanya diundang untuk terlibat dalam loka-karya tentang program-program OCAP. Pelatihan-pelatihan untuk hal-hal yang lebih penting hanya dikhususkan untuk kelompok-kelompok bentukan OCAP.

La'o Hamutuk percaya bahwa program pembangunan kapasitas harus diprioritaskan bagi masyarakat sehingga mereka tidak tergantung pada fasilitator lapangan dan agar program tersebut dapat dilaksanakan bahkan setelah program OCAP berakhir. Selain itu, materi pelatihan harus dipusatkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal daripada dipusatkan pada prioritas yang ditetapkan oleh organisasi bentukan OCAP.

Pendanaan dan alokasinya

Jumlah dana yang dianggarkan untuk program OCAP selama lima tahun operasi ialah €3.359.257 atau US\$4.116.736 (angka yang diberikan OCAP mengandaikan konversi sebesar \$1.225 untuk satu Euro), termasuk biaya administrasi sebesar 7% dalam rangka penerapan program tersebut. Komisi Eropa menyediakan sekitar \$3.752.000 untuk program tersebut sementara UNDP memberikan sekitar \$364.000

Tahun anggaran	Dana	
2004	\$	3.361
2005	\$	693.322
2006	\$	1.279.300
2007	\$	1.005.134
2008	\$	772.474
2009	\$	363.145
Total	\$	4.116.736
Perencanaan anggaran UNDP		

untuk pengembangan kapasitas masyarakat seperti pelatihan, pertanian dan lahan percontohan. Dari keseluruhan anggaran ini, pencairan tahunan dan untuk program tersebut ditentukan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan oleh UNOPS dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mandat program tersebut.

Pengeluaran sebenarnya dari UNDP untuk program OCAP untuk setiap tahun anggaran dari tahun 2004 hingga 2007, yang mana sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan untuk tujuan sumber daya manusia.

Tabel di halaman berikut berdasarkan alokasi dana UNDP untuk program OCAP September 2007 dan dianai oleh Komisi Eropa menyertakan segala pengeluaran OCAP selama tahun-tahun tersebut di atas. Tabel ini menunjukkan bahwa hampir semua uang digunakan untuk administrasi, gaji dan kegiatan-kegiatan pengawasan sementara jumlah untuk proyek OCAP sangat sedikit.

Struktur OCAP

1. Komite Penggerak Program (PSC) tingkat nasional:

Anggotanya terdiri dari:

- Kementerian Pertanian dan Perikanan (Ketua)
- Kementerian Ekonomi dan Pembangunan (Wakil Ketua)
- Kementerian untuk Pemerintahan dalam Negeri dan Perencanaan Wilayah
- Pemerintahan Distrik Oecusse
- UNDP
- UNOPS
- Pengelola Program nasional OCAP
- Perwakilan Komisi Eropa di Timor-Leste

Keanggotaan ex-officio:

- Kementerian Infrastruktur
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri

Pengeluaran OCAP	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Sumber daya manusia (gaji, administrasi dan per diem)	\$ 67.713	\$ 453.118	\$479.506
Perlengkapan dan peralatan (komputer, sepeda-motor, mebel, kendaraan, alat-alat)		\$ 98.300	\$ 1.689
Kantor Setempat /ongkos kegiatan (sewa kantor, peralatan kantor, listrik, perawatan)		\$ 192.841	\$ 40.107
Ongkos lainnya, layanan (survey, evaluasi, laporan, pemantauan, dll.)		\$ 227.740	\$228.538
Lain-lain			\$ 4.363
Biaya administrasi (Maksimum 7%)	\$ 4.740	\$ 68.040	\$ 5294
Total	\$ 72.453	\$1.040.039	\$806.996
Pengeluaran OCAP yang sebenarnya. Nilai <i>US dollar</i> dihitung dari <i>Euro</i> .			Sumber: UNDP

Tanggung jawab: Memberikan koordinasi kebijakan di tingkat pusat dan panduan menyeluruh kepada OCAP, mengesahkan kebijakan-kebijakan program, menerima dan mengkaji-kembali laporan-laporan tiga-bulanan tentang program OCAP dan menyelesaikan masalah seputar kebijakan yang disampaikan oleh PWC di tingkat distrik.

2. Komite Pelaksana Program (PWC) pada tingkat distrik:

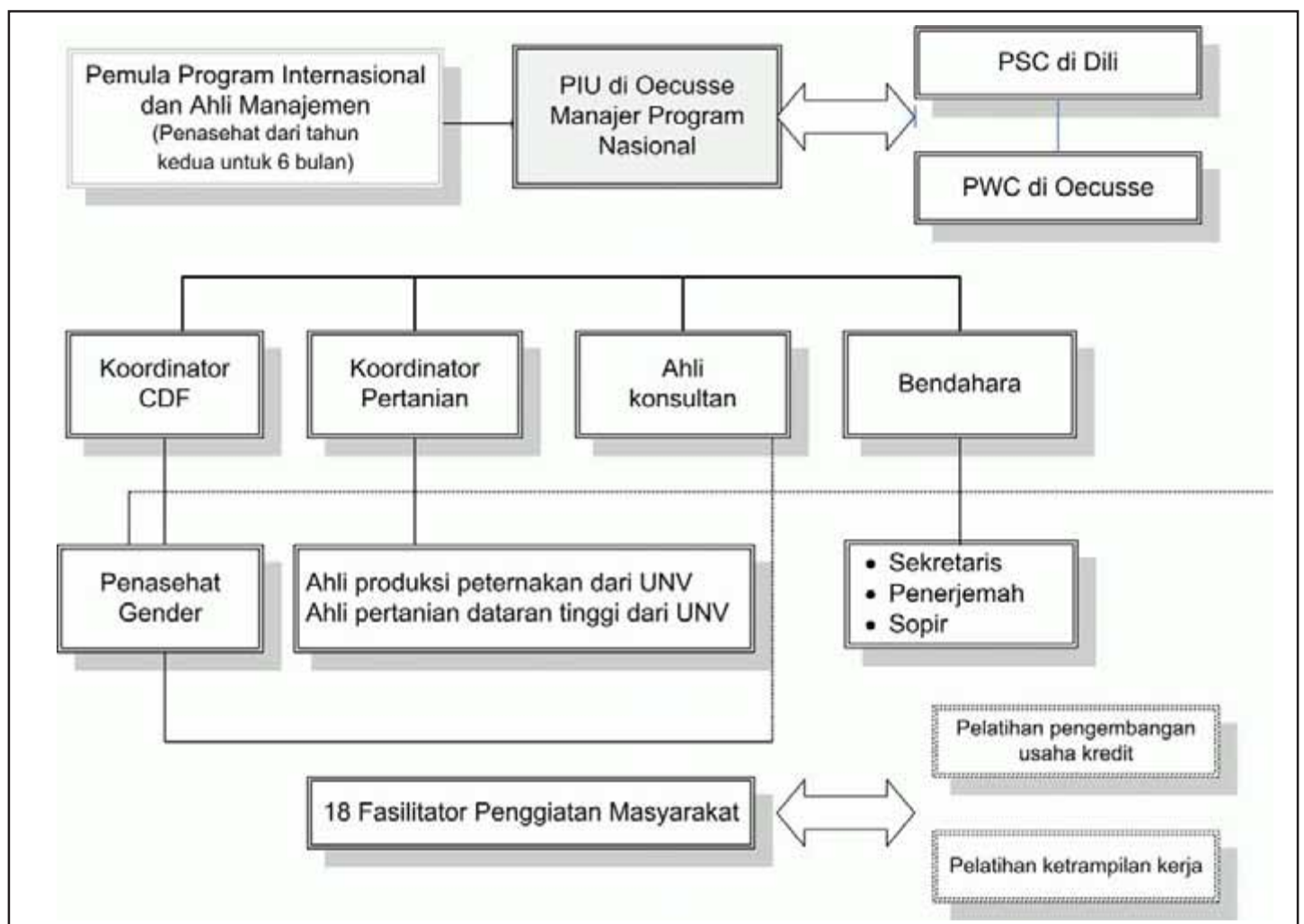
Anggota:

- Administrator Distrik (Ketua)
- Koordinator Pertanian (MAP) (Wakil Ketua)

- Koordinator sub-distrik OCAP
- Pengelola Pembangunan Masyarakat OCAP tingkat Sub-Distrik
- Aparat pejabat kementerian di tingkat distrik
- Ex-Officio: Utusan warga / masyarakat sipil

Sekretariat: Unit Implementasi Program (PIU)

Tanggung jawab: Memantau berbagai kegiatan dan rencana kerja OCAP, mendiskusikan hal-hal yang timbul karena pelaksanaan kegiatan sehari-hari, mengkaji laporan perkembangan berkala dari OCAP, memberikan usulan menyangkut kebijakan dan masukan kepada PSC pada tingkat nasional.



3. Sekretariat atau Unit Implementasi Program (PIU)

Tanggung jawab: Mengelola dan mengimplementasikan program OCAP. Dalam pelaksanaan programnya, PIU bekerja-sama secara erat dengan Administrator Distrik yang memberikan saran seputar prosedur-prosedur politik dan teknik dari Komite Penggerak Program, juga bekerja-sama dengan spesialis garis ajensi lainnya dan Komite Penggerak Program.

Pemantauan lain

Penelitian *La' o Hamutuk* akan OCAP menunjukkan sejumlah masalah yang perlu diperhatikan:

1. Memasarkan hasil-hasil pertanian

Salah satu hambatan nyata yang menghadang masyarakat Oecusse ialah bagaimana memasarkan hasil pertanian mereka. Lokasi para petani yang jauh dari pasar serta jalanan yang rusak membuat para petani kesulitan mencapai pasar. Sekarang, sebagian besar mereka memasarkan hasil pertanian mereka di pasar-pasar setempat tetapi bukan di pasar-pasar penting seperti pasar Pante Makassar dan Tono yang terletak di ibukota kabupaten. Ini berarti bahwa sebagian besar hasil panen mereka lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tetangga mereka dan dengan demikian mereka tidak banyak mendapatkan uang sebagai pendapatan atau keuntungan ekonomi.

Pada akhir tahun 2006, UNDP mengatakan kepada *La' o Hamutuk* bahwa sebuah tim teknis Oecusse (yang terdiri dari Sekretaris Negara, Administrator Distrik, Kepala Kabinet, Penasehat Senior Sekretaris Negara, Koordinator Pertanian OCAP dan dua orang pengusaha) mengunjungi sejumlah kota di Timor Barat seperti Wini, Kefamenanu dan Kupang guna membahas tentang peningkatan perdagangan antara Oecusse dan Timor Barat. Pada saat yang sama, OCAP tengah merancang kebijakan yang mengatur perdagangan lintas-batas. Hubungan dengan sejumlah pejabat di Indonesia telah terbangun dan proses untuk memudahkan pemasaran hasil-hasil pertanian dari Oecusse ke Timor Barat diharapkan segera dimulai.

La' o Hamutuk sepenuhnya mendukung upaya OCAP dan Pemerintah Timor-Leste tetapi kami percaya bahwa langkah pertama yang harus dilakukan ialah memberdayakan masyarakat lokal di berbagai bidang pertanian berkelanjutan sebelum secara resmi membuka perdagangan internasional. Jika para petani belum siap bersaing pada perdagangan lintas-batas, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah mereka.

2. Kurangnya peran pemerintah dalam pelaksanaan program OCAP

Walaupun pemerintah Timor-Leste adalah rekan OCAP, hanya segelintir pejabat pemerintah yang terlibat dalam implementasi program-program OCAP. Para pejabat pemerintah adalah anggota baik dalam PSC maupun PWC, kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan pejabat kementerian Pertanian dan Pembangunan tidak tahu-menahu soal OCAP. Berdasarkan wawancara kami dengan para pejabat di dua kementerian tersebut, peran pemerintah di dalam OCAP adalah hanya sebatas menerima laporan



Proyek CDF di Desa Abani. Balai pertemuan masyarakat telah diselesaikan di bulan Agustus namun belum di pergunakan sejak itu karena para pekerja belum dibayar dan mereka memegang kuncinya.

implementasi program OCAP dari UNDP. Wakil Kementerian Pertanian (MAP) di Oecusse juga tidak tahu banyak tentang OCAP walaupun sering diundang menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh OCAP. Kendatipun MAP dan Layanan Air dan Kesehatan Lingkungan (SAS) adalah bagian dari pelaksanaan program, OCAP hanya mengirimkan informasi dan laporannya kepada UNDP dan PSC di Dili sementara kantor distrik MAP tidak menerima apapun dari OCAP.

Administrator Distrik Oecusse, yang juga merupakan pejabat PWC, mengatakan kepada kami bahwa perannya di dalam komite tersebut dibatasi hanya sebatas konsultasi dan rekomendasi sementara UNOPS dan UNDP melakukan segala keputusan menyangkut OCAP. Sementara itu, Merita Marques dari OCAP mengatakan kepada kami bahwa PWC mengambil keputusan mengenai CDF berdasarkan proposal dari masyarakat sesuai dengan prioritas dan memperlihatkan bukti tanda-tangan anggota PWC pada saat setiap proposal yang diterima. Walaupun hal ini benar, dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa tanggung-jawab PWC sebatas memberikan saran dan rekomendasi terhadap proposal-proposal yang masuk.

Karena program OCAP ialah untuk mendukung Rencana Pembangunan Nasional Timor-Leste, *La' o Hamutuk* berpikir bahwa Pemerintah seharusnya lebih banyak terlibat. Pihak mana saja yang terlibat dalam program tersebut seperti MAP, seharusnya memainkan peran mereka secara aktif dan mengadakan koordinasi di antara mereka guna mengimplementasikan program OCAP tersebut dengan sukses. Demikian juga, UNDP dan UNOPS seharusnya memudahkan setiap pihak yang terkait agar berperan-serta secara aktif daripada hanya mengklaim adanya partisipasi seperti itu, walaupun tidak jelas keberadaannya.

3. Kurangnya koordinasi dengan aparat pemerintah lokal dan para pemimpin masyarakat

Hanya satu dari tiga belas suku yang dikunjungi *La' o Hamutuk* memiliki kepala desa dan seorang kepala

kampungnya terlibat di dalam program-program OCAP. Pimpinan masyarakat lainnya tidak mendapatkan informasi yang memadai perihal perkembangan OCAP di desa mereka sendiri karena selama ini koordinasi antara struktur OCAP dengan para pemimpin lokal sangat minim sejak sosialisasi program OCAP pada tahun 2001 dan 2005. Para fasilitator OCAP di setiap suku biasanya hanya mengadakan mengontak langsung dengan Kelompok Swadaya (SHGs).

La'ó Hamutuk percaya bahwa OCAP, lewat fasilitator lapangan mereka, harus menjalin hubungan yang efektif dengan para pimpinan lokal dan tradisional di setiap desa karena mereka yang paling mengenal masyarakat di sekitar mereka secara baik. Sementara itu partisipasi aktif dari para pemimpin lokal juga dapat mendorong anggota masyarakat untuk lebih terlibat, dan juga merupakan suatu cara yang efektif untuk memantau berbagai kegiatan SHGs.

4. Pemberdayaan kaum perempuan pedesaan

Pemberdayaan terhadap kaum perempuan pedesaan harus menjadi prioritas. Mengingat bahwa masyarakat pedesaan masih sangat patriarkal, kaum perempuan lebih sering dimarginalisasikan di dalam banyak aspek pembangunan. Program OCAP untuk membangun kapasitas kaum perempuan adalah suatu upaya positif. Akan tetapi *La'ó Hamutuk* menilai bahwa program pemberdayaan perempuan ini seyogyanya menyediakan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik yang meliputi berbagai aspek kehidupan kaum perempuan, meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil berbagai keputusan penting.

Banyak masyarakat pedesaan benar-benar diasingkan sehingga pembangunan pedesaan adalah suatu prioritas pembangunan yang penting. Oleh karena itu program yang cocok ialah bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Kami percaya bahwa program OCAP bisa jadi merupakan suatu program yang sangat penting yang membawa keuntungan bagi masyarakat di daerah pedesaan. Namun, sistem operasional dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut masih serupa dengan program lainnya yang ada.

5. Kelompok-kelompok yang terbentuk dalam masyarakat terlalu banyak

Sebagai tambahan terhadap Kelompok-kelompok Swadaya yang dibentuk OCAP, kelompok-kelompok lainnya pun telah dibentuk oleh MAP, Caritas, Oxfam, FFSO, Palang Merah Timor-Leste, dan sejumlah LSM lainnya di Oecusse.

Semua kelompok ini tentu saja menciptakan kebingungan dan kecemburuan di tengah masyarakat karena sejumlah kelompok memiliki kegiatan yang sama, walaupun dana untuk kegiatan tersebut berasal dari sumber dana yang berbeda. Oleh karena itu, saat salah satu kelompok mengalami masalah, sejumlah anggota kelompok berpindah ke kelompok lain.

La'ó Hamutuk berpendapat bahwa organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pengembangan pedesaan harus melakukan evaluasi bersama mengenai berbagai kelompok yang telah dibangun sehingga mereka dapat memperkuat mutu dan efektivitas setiap kelompok daripada memperbanyak kelompok. *La'ó Hamutuk* menyarankan agar kelompok yang bergerak di sektor yang sama di desa yang sama seharusnya membagikan pelatihan dan informasi sehingga mereka mempunyai ketrampilan yang serupa agar kecemburuan dan persaingan antar-kelompok dapat dihindari.

6. Rekomendasi Umum

Setelah melihat berbagai aspek program OCAP, *La'ó Hamutuk* meragukan akan keberlanjutan program OCAP, dan tidak tahu apakah keuntungan yang ada akan lama dirasakan. Jika UNDP dan UNOPS tidak secepatnya mengkaji-kembali dan memperbaiki masalah yang ada, akan secara jelas bahwa program tersebut tidak membawa keuntungan bagi masyarakat lokal.

La'ó Hamutuk mendesak UNDP, UNOPS dan wakil Pemerintah Timor-Leste yang terlibat di dalam program tersebut untuk secepatnya mengevaluasi kembali program ini sehingga empat juta dolar tidak disia-siakan tanpa hasil yang konkret dan bertahan lama. ❖

Dengarkan Program Radio "I gualidade" La'ó Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu penting yang kami pantau!

Setiap Minggu pada jam 1:00 siang di Radio Timor-Leste

Setiap Kamis jam 9:00 malam di Radio Comunitas Atoni Oecussi.

Lowongan Kerja

La'o Hamutuk - Berjalan Bersama

Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor-Leste

La'o Hamutuk adalah sebuah organisasi bersama antara Timor-Leste dan Internasional yang memonitor, menganalisa dan melaporkan tentang institusi-institusi internasional yang terlibat dalam proses rekonstruksi dan pembangunan di Timor Leste. *La'o Hamutuk* percaya bahwa masyarakat Timor-Leste yang harus menjadi pengambil keputusan utama mengenai proses pembangunan di Negara mereka, dan proses itu haruslah demokratis, partisipatif dan transparan. *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara organisasi internasional, pemerintah Timor-Leste dan masyarakat Timor Leste, dan juga menyediakan informasi tentang model pengalaman dan praktek-praktek pembangunan alternatif.

La'o Hamutuk bekerja di lima bidang utama yaitu: Sumberdaya Alam, khususnya minyak dan gas; Pertanian; Pemerintahan dan Demokrasi; Ekonomi dan perdagangan; dan Pelayanan Sosial.

Informasi lebih lengkap tentang *La'o Hamutuk* dan publikasinya, termasuk buletin, pernyataan dan laporan tahunan, dapat diperoleh di www.laohamutuk.org dan pada halaman terakhir dari setiap bulletin.

Pada saat ini kami sedang mencari orang berkualitas, untuk ditempatkan di Dili dengan melakukan tugas regular di distrik-distrik, untuk melengkapi tim-tim berikut:

1. **Peneliti dalam tim sumber daya alam (nasional)**
2. **Peneliti dalam tim ekonomi dan perdagangan (nasional)**
3. **Peneliti dalam tim pemerintahan dan demokrasi (internasional)**

Rincian Kerja

Setiap peneliti melakukan penelitian dan melaporkan kegiatan dari organisasi internasional, pemerintahan dalam dan luar negeri, dan institusi-institusi lainnya yang beroperasi di Timor-Leste. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi non-hirarkis dimana semua staff bertanggung jawab dan mengkoordinasi semua aktivitas, dan semua keputusan berhubungan dengan organisasi dibuat secara konsensus. Peneliti juga dituntut untuk melakukan kegiatan lain di dalam organisasi, termasuk bekerjasama dengan staff lain dan dewan penasihat untuk menyusun dan mengimplementasi rencana kerja organisasi.

Kami Membutuhkan:

- √ Pengalaman kerja dalam pembagunan internasional dan/atau peneliti kebijakan, dengan kemampuan untuk mempresentasikan informasi secara jelas dari penelitian ke bentuk tulisan dan lisan
- √ Komitmen kuat untuk mewujudkan proses pembagunan di Timor-Leste menjadi lebih demokratis, partisipatif, dan transparan
- √ Pengalaman sebagai aktivis politik dan/atau advokasi hak asasi manusia
- √ Pengalaman dan pengetahuan tentang bidang monitoring yang disebutkan di atas (Sumberdaya Alam, Ekonomi dan Pemerintahan)
- √ Lancar dalam menulis dan berbicara dalam berbahasa Inggris, Tetum dan/atau Bahasa Indonesia. Portugis juga diharapkan
- √ Kuat dalam berorganisasi dan keterampilan komputer
- √ Komitmen untuk membagi keahlian dan membantu mengembangkan kemampuan orang lain
- √ Pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan politik Timor-Leste
- √ Pengalaman tinggal dan bekerja di negara berkembang; bersedia dan mampu hidup secara sederhana
- √ Sehat fisik dan mental
- √ Kesiediaan untuk komitmen kerja di *La'o Hamutuk* paling kurang untuk satu tahun

Kami Menawarkan:

La'o Hamutuk adalah sebuah organisasi yang kecil tetapi bersemangat; staff kami bekerja sama dalam tim dengan isu yang berbeda. Staff Lokal dan Internasional *La'o Hamutuk* memiliki tanggung jawab dan kompensasi yang sama, termasuk menerima gaji 400 US\$/bulan, dengan asuransi kesehatan dan biaya sewa rumah sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk staf internasional perjalanan datang dan pulang Timor-Leste dan readjustment allowance juga disediakan.

Kontak:

Lamaran dapat dimasukkan kapan saja dan akan di pertimbangkan ketika diterima. Harap lampirkan:

- √ Surat Lamaran yang menjelaskan posisi mana anda ingin melamar dan mengapa anda ingin bekerja dengan *La'o Hamutuk*
- √ Kurikulum Vitae yang menjelaskan latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja profesional dan sukarelawan
- √ Contoh karangan tentang proses pembangunan di Timor-Leste, panjangnya dua sampai lima halaman
- √ Kontak detail dari dua referensi

Lamaran dapat dikirimkan ke kantor *La'o Hamutuk* di Farol, Dili, Timor-Leste, atau ke info@laohamutuk.org

Publikasikan Apa yang Anda Bayar

Mengonsolidasi gerakan Asia-Pasifik

Koalisi Publikasikan Apa yang Anda Bayar (*Publish What You Pay - PWYP*) adalah kampanye global masyarakat sipil untuk transparansi dalam pendapatan minyak, gas dan pertambangan. Koalisi ini memiliki 300 anggota dari 50 negara yang bekerja untuk pembangunan, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, media dan persoalan-persoalan lainnya. PWYP diluncurkan pada 2002 oleh Global Witness, CAFOD, Save the Children, Transparency International dan Open Society Institute. PWYP meminta undang-undang sebagai prasyarat kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah untuk memperlihatkan pembayaran dan pendapatan, yang berhubungan dengan eksploitasi sumber-sumber mineral. Tujuan PWYP adalah untuk membuat perusahaan-perusahaan melaporkan segala bentuk pembayaran, kepada setiap tingkatan pemerintah dan di setiap negara dimana perusahaan beroperasi, dan membuat pemerintah melaporkan semua pendapatan dari ekstraksi sumberdaya alam, dikelompokkan dalam perusahaan dan bentuk pendapatan (misalnya pajak, royalti, bonus, persetujuan pembagian pendapatan).

Artikel ini mencakup persoalan-persoalan seputar transparansi dalam sumber-sumber ekstraksi yang tidak dapat-diperbaharui yang selenggarakan di Bali selama 5 hari.

Koalisi Publikasikan Apa yang Anda Bayar, bersama dengan Revenue Watch Institute, menyelenggarakan Lokakarya pertama Asia-Pasifik pada tanggal 6-11 Agustus 2007 di Denpasar, Bali, mengumpulkan bersama lebih dari 60 orang peserta masyarakat sipil dari negara-negara Asia-Pasifik yang kaya akan sumber-sumber daya yang tidak dapat-diperbaharui. Mereka datang dari Australia, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Fiji, Filipina, Burma, Kamboja, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia dan Timor-Leste, juga masyarakat sipil dari Mongolia, Kazakhstan dan Ghana.

Tiga belas peserta dari Timor-Leste diseleksi oleh panitia penyelenggara lokakarya, berdasarkan pada bidang kerja mereka. Kebanyakan mereka dari Kelompok Inti Transparansi yang memantau anggaran nasional termasuk pengelolaan pendapatan perminyakan, dan juga perwakilan dari media. Peserta-peserta tersebut adalah: Georginha Bianco dari Mata Dalan Institute, Julino da Silva Ximenes dari Perkumpulan HAK, Carlos Florindo dari ETADep, Maria Dias Ximenes dari Rede Feto (anggota Dewan Penasehat Dana Perminyakan), Jose Alves dari NGO Forum, Jose da Costa Alves dari Luta Hamutuk, Guteriano Neves dari *La'õ Hamutuk*, Mario de Araújo dari Oxfam Australia, Rosalina Pires dari kantor Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, Jose Sarito dari *Timor Post* dan Antonio Febu da Silva dari Radio Timor-Leste. Peserta dari Timor-Leste dikoordinir oleh Santana Soares dari *La'õ Hamutuk* dan Thomas Freitas dari Luta Hamutuk, yang juga sebagai anggota Dewan Penasehat Dana Perminyakan.

Lokakarya Asia-Pasifik mengumpulkan kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk transparansi dalam

sektor perminyakan dan pertambangan, dan juga mereka yang terlibat dalam kampanye **Publikasikan Apa yang Anda Bayar** pada transparansi industri ekstraktif. Lokakarya ini juga membantu mengasah kemampuan para aktivis dalam berkampanye secara efektif di negaranya, dan juga memperluas dan menumbuhkan kesadaran.

Cadangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang paling bernilai adalah minyak, berlian, emas, dan uranium, dapat membuat orang berkhayal, berharap bahwa pendapatan yang akan mereka berikan kepada pemerintah bisa menghasilkan pekerjaan, uang dan pelayanan kepada masyarakat, dan bahwa ekstraksi mereka dapat menjadi motor pembangunan ekonomi lokal. Walaupun demikian, pengalaman banyak negara yang kaya akan sumber alam ini menunjukkan bahwa kekayaan sumberdaya alam seringkali mendorong mereka ke dalam "kutukan sumberdaya alam" (*resource curse*), dengan meningkatnya harga, meningkatnya impor, dan mengabaikan sektor pertanian dan sektor lainnya. Negara yang tergantung pada pendapatan minyak, gas dan pertambangan adalah yang paling riskan, dan mereka banyak mengalami korupsi, konflik, kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kemiskinan.

Transparansi dalam pengelolaan pendapatan sangatlah penting untuk membantu mencegah kutukan sumberdaya alam, dan Publikasikan Apa yang Anda Bayar mengkampanyekan hal itu. Jika masyarakat memiliki informasi yang memadai, mereka memiliki satu alat untuk membuat pemerintahnya bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan sumber alam mereka. Transparansi dalam pengelolaan pendapatan dalam industri ekstraktif sangat penting untuk menjamin pendapatan sumberdaya alam dikelola dengan tepat, untuk memberi keuntungan kepada warganegara melalui penyediaan kerja, mengembangkan ekonomi dan memperbaiki pelayanan umum.

Di bawah ini adalah beberapa persoalan-persoalan yang dibahas dalam lokakarya itu:

EITI dan PWYP

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative - EITI*) adalah sebuah usaha global untuk meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan pendapatan minyak, gas dan pertambangan. EITI adalah inisiatif multistakeholder yang didirikan bulan September 2002 oleh Pemerintah Inggris. Saat ini, ada 24 negara yang telah menyokong EITI, 15 negara lagi sebagai kandidat. Sembilan negara lainnya termasuk Timor-Leste masih mengumpulkan informasi lebih lanjut. Beberapa perusahaan minyak dan pertambangan juga telah mengekspresikan kesediaan mereka untuk menggunakan EITI sebagai standar internasional, walaupun kebanyakan mengatakan bahwa mereka hanya akan melakukannya jika pemerintah negara pemroduksi sumber daya alam meminta mereka untuk melakukannya.



Publikasikan Apa yang Anda Bayar adalah gerakan internasional yang mengkampanyekan untuk menjadikan EITI sebagai mekanisme untuk memperkuat hak masyarakat akan informasi dengan meloloskan undang-undang yang mewajibkan pemerintah dan perusahaan untuk mulai menerapkan transparansi secara terbatas. Sekretariat Publikasikan Apa yang Anda Bayar ada di Inggris, dan dikelola oleh Koordinator Internasional dan Staf Komunikasi. Kelompok Penasehat Strategis (*Strategic Advisory Group - SAG*) memberikan bimbingan strategis untuk kampanye, menjajaki kesempatan kepada PWYP untuk memajukan advokasinya, mengevaluasi kemajuan tujuan dan aksi yang telah disetujui, memediasi konflik yang terjadi di dalam koalisi, dan mendukung anggota yang telah diancam. Rizki Wibowo dari Transparency International Indonesia dan Santana Soares dari *La'o Hamutuk* adalah anggota SAG yang mewakili Asia-Pasifik, dimana pertemuan pertamanya diselenggarakan di Oslo 23-27 September 2007.

EITI dan PWYP menyerukan transparansi, tetapi perbedaan antara EITI dan PWYP adalah EITI bersifat sukarela di tingkat global dan tergantung pada keikutsertaan pemerintah, sementara PWYP tumbuh dari masyarakat sipil dan mengkampanyekan transparansi secara luas dan mendalam. PWYP mencoba mempengaruhi keduanya, pemerintah dan perusahaan untuk menetapkan mekanisme untuk pelaporan umum tentang segala bentuk aktivitas pembayaran, untuk setiap negara dan setiap pemerintah, mengelompokkan informasi per negara, perusahaan dan bentuk pembayaran. Pada intinya, PWYP mengkampanyekan untuk lebih transparan lagi dari pada yang telah dicapai oleh EITI sekarang ini.

EITI hanya langkah pertama

Lokakarya ini membahas mengenai EITI sebagai salah satu mekanisme yang dapat membantu mengurangi kutukan sumber daya alam, dan peserta berbagi pengalaman tentang tantangan, kelemahan, kesulitan dan

pengalaman dari negara-negara yang telah menerapkan EITI. Di wilayah Asia-Pasifik, Pemerintah Timor-Leste telah menyokong prinsip EITI pada 2003 dan sekarang dalam proses penerapan. Karena kita sedikit lebih maju dari negara-negara lain di Asia-Pasifik, peserta lokakarya dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Indonesia sangat tertarik untuk belajar dari pengalaman Timor-Leste, untuk membantu mereka menggunakan EITI untuk memperbaiki transparansi dan meningkatkan keuntungan sumberdaya alam kepada masyarakat.

Selama lokakarya berlangsung, peserta dan para narasumber mengangkat banyak persoalan, yang menunjukkan bahwa EITI masih bertumbuh. Kami setuju bahwa EITI sendiri tidaklah cukup untuk menghindari kutukan sumberdaya alam. Ini karena EITI hanya mencakup pengelolaan pemerintah akan uang dari aktifitas ekstraksi, tetapi tidak termasuk pengelolaan akan sumber daya alam secara fisik baik oleh pemerintah maupun perusahaan, atau lebih dikenal dengan pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan yang penting ini sering membinggunkan orang baik masyarakat sipil maupun pemerintah. Transparansi hanya dalam pengelolaan pendapatan tidak dapat memastikan penggunaan yang baik dan adil dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan transparansi tidak dapat menjamin bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh warganegara, seperti kekerasan dalam masyarakat dan masalah hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan perhatian pada kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak tidak ditangani dengan tepat.

Willy H. Olsen, seorang yang telah bertahun-tahun bekerja dengan industri perminyakan Norwegia, dalam presentasinya di hari pertama lokakarya mengatakan “sumber daya alam sering dilihat sebagai lambang kekayaan, tetapi itu hanyalah lambang belaka” kalimat ini mengekspresikan pesan yang sangat berarti kepada negara yang kaya akan sumber daya alam: bahwa dengan memiliki barang tambang dan minyak tidak

dengan sendirinya berarti bahwa semua orang akan menjadi kaya. Kebanyakan orang di negara-negara seperti ini sering memiliki harapan yang jauh dari kenyataan; banyak dari mereka tidak mendapatkan keuntungan yang berarti dari sumber daya alam itu, dan terus hidup di bawah kemiskinan. Dengan alasan ini, banyak organisasi yang berkampanye agar pemerintah dan perusahaan berhenti mengeksploitasi sumber daya yang tak bisa diperbaharui. Mereka merasa bahwa eksploitasi ini sering kali membahayakan masyarakat setempat, sementara kaum elit menjadi lebih kaya dan kuat. Oleh karena itu salah seorang peserta dari Filipina memperdebatkan bahwa dengan mendukung EITI, berarti hanya memberikan izin kepada perusahaan untuk mengeksploitasi minyak dan barang-barang tambang.

EITI dipengaruhi oleh banyak hal

Institusi-institusi Keuangan Internasional (International Financial Institutions - IFIs) seperti Bank Dunia dan IMF secara mendalam terlibat dalam industri ekstraktif, dan peranan mereka mengkhawatirkan. Misalnya, Bank Dunia mengelola EITI Multi-Donor Trust Fund, yang membiayai bantuan teknis untuk implementasi EITI. IFIs memiliki wewenang yang tinggi, dan menggunakan pinjaman dan pengaruh keuangan mereka untuk menekan pemerintah, perusahaan dan para penanam modal. Ini bermasalah karena warganegara, pemerintah dan IFIs terkadang memiliki perbedaan pandangan, seperti apakah sebaiknya sumber daya alam dieksploitasi oleh perusahaan publik atau pribadi. Oleh karena itu, nasehat teknis IFIs kepada pemerintah terkadang tidak tepat untuk situasi negara tertentu.

EITI awalnya sebagai inisiatif sukarela berdasarkan keinginan dari pemerintah penyelenggara dan perusahaan. Meskipun demikian, walaupun EITI bukanlah sebuah mekanisme yang mengikat secara hukum, para penganjur bisa menuntut pemerintah membuat sebuah syarat hukum bahwa informasi dipublikasikan. Misalnya, Nigeria telah menerapkan EITI, diperkuat dengan jaminan hukum. Ini adalah proses yang sulit, dan lokakarya ini memperdebatkan hal ini secara aktif mengenai haruskah advokasi PWYP diperluas, karena peserta melihat keterbatasan EITI merupakan kelemahan yang serius.

Meskipun begitu, kebanyakan peserta menyetujui bahwa kampanye PWYP sebaiknya tetap terfokus pada pengelolaan pendapatan, dan memberikan persoalan luas yang berhubungan dengan sumber daya alam kepada organisasi lain yang berkemampuan lebih. Di seluruh dunia banyak organisasi dan jaringan yang secara efektif berkampanye akan hak asasi manusia, hak masyarakat lokal, dan hak atas tanah. Misalnya, *La'o Hamutuk* menjelaskan pengalaman hubungan kami dengan jaringan Oilwatch, sebuah gerakan yang sangat kuat di Amerika Selatan dan Afrika, dimana mereka bekerja untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh pengembangan perminyakan. Akhirnya, kami setuju untuk membentuk sebuah tim yang akan mengeksplorasi bagaimana menyatukan misi PWYP dengan permasalahan lain yang diperdebatkan dalam lokakarya. Tim ini akan melaporkan

ke perencanaan strategis internasional pada 2008 untuk diskusikan lebih lanjut.

Pelajaran dari lokakarya

Semua delegasi sangat antusias, secara aktif memperdebatkan persoalan-persoalan ini dan bagaimana memperkuat jaringan secara nasional, regional dan internasional. Advokasi sangatlah penting untuk mempengaruhi perubahan sosial di wilayah Asia-Pasifik yang kaya akan sumberdaya alam tetapi tidak berpengalaman dalam hal transparansi. Sayangnya, minyak dan barang tambang yang dikombinasikan dengan pemerintahan yang korup dan perusahaan yang rakus seringkali membawa kemiskinan dan keterbelakangan. Peserta dari negara pasifik seperti, Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon sangat ingin belajar lebih banyak lagi mengenai bagaimana melibatkan pemerintah mereka untuk mengadopsi EITI.

Mereka dapat belajar dari pengalaman Nigeria dan Ghana di Afrika, yang telah lama menderita dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial lain dan sekarang baru memulai berdiri kembali bangkit mencari jalan untuk mengontrol pemerintah mereka. Di wilayah bagian Barat dan Asia Tenggara, Mongolia, Kazakhstan dan Azerbaijan juga menerapkan EITI. Juga, Timor-Leste – negara muda yang mencoba untuk tidak mengulangi pengalaman buruk dari negara lain, dengan membuat undang-undang dan peraturan untuk mempromosikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan, termasuk penerapan EITI. Delegasi Timor-Leste menekankan bahwa “Transparansi membutuhkan keinginan baik pemerintah dan perusahaan dalam implementasinya.” Meskipun demikian, Timor-Leste masih lama untuk mencapai jaminan bahwa pemerintah Timor-Leste adalah transparan dan untuk berusaha membuat perusahaan bertanggung jawab, dan memastikan keduanya mengikuti janji-janji mereka.

Sebagai kesimpulan, semua peserta menyetujui bahwa dukungan internasional sangat diperlukan untuk memperkuat advokasi dari negara masing-masing, dan koalisi PWYP internasional seharusnya mendukung kampanye lokal tiap anggota.

Langkah selanjutnya untuk Timor-Leste

Pada akhir lokakarya, para peserta dari tiap negara mempresentasikan rencana program nasional mereka. Peserta dari Timor-Leste merencanakan untuk Kelompok Inti Transparansi supaya terus mengkampanyekan transparansi dalam pengelolaan pendapatan dan persoalan lain yang berhubungan dan Kelompok Inti menjadikan kontak PWYP di Timor-Leste. Institusi Mata Dalam yang akan memfasilitasi pertemuan Kelompok Inti. Dalam waktu dekat Kelompok Inti akan menerima pelatihan dari seorang yang berpengalaman khusus dalam memantau anggaran negara dan persoalan lain. Kami juga berharap untuk memperluas kampanye ini dan mengundang mereka yang tertarik untuk bergabung atau mendukung agar menghubungi Georinha Bianco dari Institusi Mata Dalam atau Mario de Araujo dari Oxfam Australia. ❖

Nota: Artigu tuir mai ne'e, Termus Referensia no Planu Serbisu nebe mak Grupu Serbisu EITI mak hakerek. Sira ne'e la sempre reprezenta *La'o Hamutuk* nia vizaun no opiniaun. Hare artigu iha pagina 12 iha *Buletin* ne'e, *La'o Hamutuk* nia analiza kona ba EITI, nebe akresenta kona ba ninia limitasaun sira.

Introdusaun: Grupu Serbisu EITI iha Timor-Leste

Iha tinan 2003 governu Timor-Leste sai hanesan nasaun foin dezenvolve ida iha mundu ne'ebé promete katak nia sei moris tuir prinsípius transparénsia husi Inisiativa Transparénsia Indústria Extrativa (EITI). EITI hanesan inisiativa mundial ida ne'ebé hetan tulun husi nasaun dezenvolidu sira no nasaun foin dezenvolve seluk atu promove transparénsia iha pagamentu no resibu osan entre indústria extrativa (mina, gas no mineiras) ho governu nain. Sira hari ona sekretáriadu ida hodi maneja programa ne'e, atu ajuda nasaun sira ne'ebe foin dezenvolve komprende EITI no fo rekoñesimentu ba sira wainhira sira hatudu ona katak sira moris tuir prinsípiu sira transparénsia nian.

Hetan rekoñesimentu iha mundu tomak hanesan nasaun ida ne'ebé moris iha prinsípiu sira EITI nian buat furak ida ba Timor-Leste tanba buat ne'e sei ajuda promove nasaun ne'e sai fatin di'ak ba investimentu no hanesan nasaun ne'ebé lakohi hetan korupsiun iha ninia industria Extrativa (mina, gas no mineiras).

Wainhira Timor-Leste hari'i nia Fundu Petróleu ida nee sai hanesan pasu signifikadu ida ba oin hodi hatudu ba mundu katak Timor-Leste hakarak maneja nia osan husi petróleu ho sensibilidade, transparénte no investe ba gerasaun tuir mai. Hetan Rekoñesimentu moris tuir prinsípius EITI nian hanesan mos ho objektivu Fundu Petróleu nian.

Tau hamutuk preparasaun hotu hodi hatudu ba mundu katak Timor-Leste moris no hala'o prinsípius EITI nian presija servisu barak no komitmentu husi Governu, Indústria, no sociedade sivil. Atu halo ne'e Timor-Leste harii ona Grupu Sersisu Nasional ba EITI ne'ebe aseita ona Termus Referensia ida kona-ba oinsa nia bele hala'o no mos halo Planu Serbisu ida. Dokumentu sira tuir mai ne'e mak termus referensia no Planu serbisu, publika ona iha *bulletin* no iha fatin sira seluk, atu nune'e ema hotu bele hare saida mak Grupu Serbisu Nasional EITI halo dadaun no hatene atu husu ba sé se sira hakarak atu husu ka buka hatene liutan kona-ba EITI.

Grupu Servisu EITI Timor-Leste: Termus Referensia

Preámbulu

Governu Timor-Leste nudar governu ida nebé deklar ba dala-uluk ninia kompromisu ba Prinsipius no Kritériu Inisiativa Transparénsia Indústria Extrativa ka *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) nian iha okaziaun konferénsia internasional ba dala-uluk kona-ba EITI iha Londres iha Juñu 2003. Afiliasaun ba EITI hanesan ho nasaun ninia objetivu, hosi inisiu kedas, kona-ba transparénsia iha sektor mina-rai no explorasaun mineral. Reseitas hosi sektor mina-rai tama iha dominiu sektor publiku nian (liu hosi relatóriu trimestral kona-ba estatutu Fundu Petrolíferu Timor-Leste nian) hanesan mos kontratu fahe produsaun sira. Medidas transparénsia kodifika tihaona iha lejislasaun sektor mina-rai nasaun nian. Atividades sektor explorasaun minas nian seidaok hahú no orasne'e sei prepara hela lei sira.

Atu orienta implementasaun tomak EITI iha Timor-Leste, hari tiha ona tripartite Grupu Serbisu EITI nian ida—nebé kompostu ho saseluk sira hosi ministériu/ajénsia relevante governu sira nian, kompañia indústria extrativa sira, no sociedade sivil.

Objetivu sira

Objetivu sira Grupu Serbisu EITI Timor-Leste nian mak atu:

√ Dezenvolve planu serbisu EITI nian nebé públiku no sustentável iha termus finanseiru (nebé Grupu

Serbisu EITI nian aprova ona hafoin halo tiha revizaun públiku no komentáriu ba esbosu planu serbisu ne'e).

√ Monitor implementasaun planu serbisu EITI nian, halo revizaun no atualizasaun periódiku ba planu serbisu ne'e tuir nesiedade.

√ Determina no konkorda ámbitu auditoria/relatóriu sira EITI nian iha Timor-Leste, elabora modelu relatóriu EITI nian nebé fasil atu kompriende ba kompañias no governu atu uza, determina termus referénsia ba no hili auditór independente ida atu rekonsilia reseita sira no dadus pagamentu nian, no garante katak publika no disemina duni relatóriu sira EITI nian.

√ Determina no konkorda nivel agregasaun/dezagregasaun mak atu hatama iha relatóriu sira nebé proteje didiak informasaun sensitivu iha termus komersial sem kompromete direitu públiku nian atu hetan informasaun kona-ba pagamentus hosi industria extrativa no mos reseitas governu nian. Grupu ne'e sei determina frekuénsia/siklu ba relatóriu sira EITI nian iha Timor-Leste.

√ Tulun resolve frakeza no sasatan sira kapasidade nian iha transparénsia industrias extrativas iha Timor-Leste no aumenta sensibilidade públiku nian (hanesan mos sociedade sivil no ONG nian) kona-ba EITI no transparénsia sektor mina-rai nian.

- √ Fasilita dezeńu, monitoramentu, no avaliasaun ba prosesu avaliasaun EITI iha Timor-Leste.
- √ Hari programa serbisu ida atu hatama indústriá explorasaun mineral iha estrutura EITI nia laran bainhira estabelese ona sektor explorasaun mineral.

Afiliasaun

Grupu Serbisu EITI nian sei hatama membru sira tuir mai:

- ◆ Secretário de Estado, Recursos Naturais /Funsionáriu Públiku Pontu Fokal EITI nian (nudar Prezidente)
- ◆ Saseluk senior rua sira hosi Ministériu Finansas/Autoridade Taxa.
- ◆ Saseluk senior hosi Autoridade Bankária no Pagamentus.
- ◆ Saseluk senior rua hosi Ministério Recursos Nasionais/Autoridade Regulador sira.
- ◆ Saseluk nain tolu hosi sosiedade sivil nebé forum organizasaun sosiedade sivil sira nebé involvidu iha fiskalizaun transparénsia no sosiedade sivil ba industira extrativa sira determina/hili.
- ◆ Saseluk nain tolu hosi kompañia indústriá extrativa sira nebé hili ho baze iha partisipasaun/interesse boot liu hosi kompañia sira nebé oras née daudaun halao operasaun iha (i) area dezeńvimentu mina-rai eksklusivu Timor-Leste nian, (ii) area dezeńvimentu mina-rai hamutuk, no (iii) futuru operadores iha JPDA no mos área asociadu ho Timor-Leste.

Membru ida-ida sei hatudu ema seluk ka substitutu ida nebé sei hola parte iha sorumutu sira Grupu Serbisu nian bainhira membru ida uluk labele partisipa. Membru ida-ida sei konsulta ho no reprezenta lolo'os interesse parte sira seluk nian iha sira-nia pilar parte interesadu laran.

Banku Mundial, IMF, asesores sektor minarai NORAD nian ba governu konvida atu hola parte nudar observadores. Grupu Serbisu bele konvida observador sira seluk bainhira nia hare'e katak adekuaudu duni tuir provizoens Tomada Desizaun/Votasaun nian hosi Termus Referénsia ne'e. Observador sira sei la iha direitu atu vota ka hola desizaun kona-ba asuntu sira nebé membru sira Grupu Serbisu nian diskute daudaun. Observador sira sei hakru'uk ba regras konduta hanesan mos membru grupu serbisu ida.

Termu Afiliasaun nian

Sei hili membru sira ba termu inisial tinan rua no bele hili hikas ba termu tinan rua tan. Tanba tenki kaer metin nafatin natureza tripartite grupu nian (mak hanesan, governu, kompañia indústriá extrativa sira, no sosiedade sivil tenki iha representasaun), grupu ne'e bele konkorda iha kualker momentu atu muda, aumenta ka diminui membru sira.

Sorumutu sira

Grupu Serbisu ne'e sei hasoru malu mínimu fulan ida dala ida ka konforme akordu to'o tempu nebé planu serbisu ne'e hasai ona ba revizaun públiku no hetan

ona avaliasaun. Grupu ne'e sei estuda hikas frekuénsia sorumutu sira nian hafoin publikasaun planu serbisu final no hetan ona avaliasaun atu garante implementasaun kompletu ba planu serbisu.

Prezidente sei konvoka no determina agenda ba sorumutu sira. Tenki sirkula avizu kona-ba sorumutu, agenda, no dokumentu informativu ruma ba membru sira Grupu Serbisu nian minimu semana ida antes loron sorumutu. Prezidente no Grupu Serbisu sei hetan apoiu hosi Sekretariadu ida. Sekretariadu ne'e sei halo funsaun koordenasau no administrativa hotu-hotu nebé presiza, hanesan transportes no komunikasaun, atu apoia Grupu Serbisu ne'e no asegura katak nia kumpri duni ninia responsabilidade espesífiku sira.

Regra Chatham House nian sei aplika ba sorumutu sira no mos ba minuta diskusaun sorumutu nian nebé Koordinator EITI mak sei kaer. Sei sirkula minuta sorumutu nian (kona-ba Regras Chatham House) ba Grupu Serbisu ne'e no sei halo disponivel ba públiku hafoin hetan akordu entre Membru sira. Membru no observador sira tenki respeita diferensa hanoin nebé mosu durante elaborasaun planu serbisu final no tenki evita diskursu iha públiku nebé bele interrompe elaborasaun esbosu Planu Serbisu ida molok halo lansamentu ba revizaun no komentáriu públiku.

Membrus no observadores Grupu Serbisu hotu-hotu sei respeita no labele diskute iha sorumutu Grupu Serbisu nia-nia liur informasaun sensitivu iha termus komersial nebé bele mosu iha kualker momentu durante elaborasaun no implementasaun Programa EITI Timor-Leste nian. Grupu Serbisu sei estuda Violasaun ba konfiansa ne'e no bele rezulta demisaun atu hola parte iha sorumutu Grupu Serbisu nian sira seluk.

Bainhira iha karik asuntu nesesáriu ka urjente ruma nebé presiza atu koalio no deside, maka Prezidente sei konvoka atu halo sorumutu extra-ordináriu ida.

Hola Desizaun/Votasaun

Quorum ida hosi Grupu Serbisu ne'e tenki forma maioria (pursentu 50) hosi prezensa membru sira nebé tenki inklui pelu menus saseluk ida hosi pilar parte interesadu ida-ida (hanesan Governu, Indústriá no Sosiedade Sivil). Grupu Serbisu ne'e sei hakas-an atu deside asuntu hotu-hotu liu hosi konsensus membru hotu-hotu nebé prezente no reprezenta quorum ida. Maibé, bainhira labele hetan konsensus ida, maka desizaun final Grupu Serbisu nian sei hola liu hosi votasaun nebé reprezenta 60% hosi quorum, inklui pelu menus membru ida hosi pilar parte interesadu ida-ida.



EITI iha TL: Rezumu Planu Serbisu Nian 2007-2009

Governu Timor-Leste nudar governu ida nebé deklaraba dala-uluk ninia kompromisu ba Prinsipius no Kritériu Inisiativa Transparénsia Indústria Extrativa ka *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) nian iha okaziaun konferénsia internasional ba dala-uluk kona-ba EITI iha Londres iha Juñu 2003. Afiliasaun ba EITI hanesan ho nasaun ninia objetivu, hosi inisiu kedas, kona-ba transparénsia iha sektor mina-rai no explorasaun mineral. Reseitas hosi sektor mina-rai tama iha dominiu sektor públiku nian (liu hosi relatóriu trimestral kona-ba estatutu Fundu Petrolíferu Timor-Leste nian) hanesan mos kontratu fahe produsaun sira. Medidas transparénsia kodifika tiha ona iha lejislasaun sektor mina-rai nasaun nian. Atividades sektor explorasaun minas nian seidak hahú no oras ne'e sei prepara hela lei sira.

Atu orienta implementasaun tomak EITI iha Timor-Leste, harí tiha ona tripartite Grupu Serbisu EITI nian ida—nebé kompostu ho saseluk sira hosi ministériu/ajénsia relevantes governu nian, kompañia indústria extrativa sira, no sociedade sivil.

Tuir mai ne'e rezumu ida konabá Planu Serbisu Grupu Serbisu EITI nian.

Objetivu Ida: Halo Kompromisu atu Implementa EITI

1a. Deklarasaun públiku malorek ida kona-ba hanoín atu implementa EITI.

- ◆ Governu fo'ó hatene ona ninia kompromisu ba EITI.

1b. Nomeasaun pontu fokal/koordinador EITI nian iha governu.

- ◆ Governu fo'ó hatene/foti koordinador EITI ida.

1c. Governu kompromete atu serbisu ho parte interesadu hotu-hotu (hanesan sociedade sivil, empresas) konabá EITI.

- ◆ Deklarasaun governu nian iha kolókiu jestaun reseitas mina-rai nian iha Novembru 2006 hatudu kompromisu atu serbisu ho sociedade sivil no empreza sira kona-ba EITI.
- ◆ Harí grupu serbisu EITI nian ho parte interesadu barak mos hatudu kompromisu governu nian.
- ◆ Identifikasaun parte interesadu barak liu tan bele hala'o nudar parte hosi agenda Grupu Serbisu EITI nian.

Objetivu Rua: Harí Grupu Serbisu EITI nian ida, Dezenvolve no Publika Planu Serbisu EITI nian ida

2a. Harí Grupu Serbisu EITI nian ida kompostu ho parte interesadu barak.

- ◆ Hafoin konvite ida hosi governu iha Janeiru 2007 ba konstituentes parte interesadu nian (hanesan, ajénsias governu nian, empreza no operadores petrolíferu no saseluk sira hosi sosieade sivil).

- ◆ Konvoka Grupu Serbisu EITI nian atu halo revizaun ba obrigasaun sira iha EITI laran no halo termos referénsia (TR).

2b. Dezenvolve no publika planu serbisu EITI nian ida no kalendáriu implementasaun.

- ◆ Dezenvolve planu serbisu EITI nian ida mak disponivel ba públiku nebé hakerek kona-ba actividades ba implementasaun EITI.
- ◆ Planu serbisu ne'e dinámiku no sei atualiza tuir nesidade.
- ◆ Sei halo komunikadu de imprensa ida kona-ba lansamentu planu serbisu EITI nian ne'e.

2c. Identifika fonte finansiametu sustentável ba implementasaun EITI

- ◆ Asegura orsamentu governu nian no/ka finansiametu hosi Fundu Fidusiáriu Multi-Doador EITI nian ka EITI *Multi-Donor Trust Fund* (MDTF) no investiga fonte finansiametu sira seluk atu apoia implementasaun EITI.
- ◆ Prepara justifikasaun orsamentu nian no/ka proposta akordu doasaun MDTF nian nebé atu hatama.

2d. Harí Sekretariadu Nasional EITI nian

- ◆ Konkorda TR ba funsióriu Sekretariadu nian no rekruta no nomeia funsióriu atu apoia Grupu Serbisu EITI nian.

Objetivu Tolu: Halakon Sasatan sira ba Implementasaun EITI/Kapasitasaun no Komunikasaun ba Liur

3a. Halo revizaun ba kadru legal atu identifika sasatan potensial sira ba implementasaun EITI

- ◆ Halo revizaun ba kadru legal atu identifika posibilidades sasatan ruma ba implementasaun EITI.
- ◆ Determina prosedimentu sira atu promove kumprimentu EITI.

3b. Kapasitasaun/treinu ba sociedade sivil (inklui mos meu komunikasaun) konabá EITI no asuntus sektor minarai nian

- ◆ Halo kolókiu no sesaun treinamentu iha Dili no Distritu sira kona-ba asuntu espesifiku sira interessantes, organiza sesaun sira atu fo'ó informasaun, explikasaun kona-ba Modelu PSC, Rejime Petrolíferu, Fundu Petrolíferu, ho seluk-seluk tan.
- ◆ Tulun Sociedade Sivil atu identifika kursu formasaun especialistas no posivel fontes finansiametu atu bele hola parte.
- ◆ Rekruta especialista internasional atu hanorin grupu fokal sira no sesaun treinamentu kona-ba asuntu sira nebé relasionadu ho indústria extrativa.

3c. Kapasitasaun/treinamentu ba no hosi indústrija kona-ba EITI no asuntos sektor mina-rai nian.

- ◆ Organiza kolókiu no sesaun formasaun iha Dili (Universidade no Eskola Sekundária) kona-ba asuntos interese espesifiku, sesaun atu fo' informasaun, ho seluk-seluk tan.
- ◆ Informasaun no diskusaun entre indústrija kona-ba EITI.

3d. Kapasitasaun/formasaun ba governu kona-ba EITI no asuntos sektor mina-rai nian

- ◆ Diskursus, kolókiu no sesaun formasaun ba Funsionáriu Públiku sira, Membrus Parlamentu nian, ho seluk-seluk tan.

3e. Atividades Komunikaun ba Liur /Fo' Informasaun

- ◆ Semináriu sira, talk show iha TV no radio, no komunikadu imprensa /artigu jornal nian, web site, lista korreiu, ho seluk-seluk tan, kolókiu no hatudu filme haleu Distritus.
- Possibilidade atu harí Sentru Rekursu Mina-rai nebé asesível ba públiku.

3f. Dezenvolve kapasidade atu fiskaliza Rendimentu Sustentável Estimadu ka *Estimated Sustainable Income (ESI)*

- ◆ Tanba projesaun produsaun nian iha ona iha dokumentus orsamentu nian, maka Grupu Serbisu sei hanoin to'o iha nebé mak bele prepara kálkulu tékniku detalladu liu ba parte interesadu relevantes.
- ◆ Hanoin kona-ba revizaun ida ba facilidade asesu ba informasaun nebé fo'o ba Parlamentu.

Objetivu Hat: Kompletu no Dissemina Relatóriu EITI nian

4a. Dezenvolve modelu reportasaun ida ba relatóriu EITI nian

- ◆ Grupu Serbisu EITI nian sei koalia no konkorda kona-ba dezeńu modelu reportasaun nian ba relatóriu EITI nian, ho objetivu atu asegura katak modelu reportasaun ne'e simples no fásil atu kompriende, no iha tempu hanesan rejista informasaun hotu-hotu nebé nesesáriu.
- ◆ Grupu ne'e sei determina mekanizmu halibur dadus no reportasaun hosi governu no empreza sira atu asegura katak konsultor independente sei simu informasaun nebé nia presiza.
- ◆ Informasaun kona-ba governu no empreza sira tenki bazeia ba konta sira nebé audit ona tuir padraun internasional sira.

4b. Determina no konkorda nivel agregasaun / dezagregasaun

- ◆ Grupu Serbisu EITI nian sei koalia no konkorda kona-ba nivel agregasaun/dizagregasaun nebé atu hatama iha relatóriu sira nebé proteje didiak informasaun sensitivu iha termus komersial sein compromete direitu públiku nian atu hetan informasaun kona-ba pagamentu sira nebé indús-

tria extrativa sira selu no mos osan nebé governu simu.

4c. Deside termus referénsia no rekruta konsultor ida atu determina se prosesu no ámbitu preparasaun Relatóriu Anual Fundu Petrolíferu konsistente no modelu reportasaun, refere ba atividade 4a.

- ◆ Grupu Serbisu EITI nian sei determina termus referénsia ba konsultor *independente* EITI nian, nebé tenki iha kredibilidade, iha kapasidade tékniku, rentável no merese konfiansa.

4d. Konsultor halo ramata ona relatóriu kumprimentu EITI no Grupu Serbisu EITI konkorda ona (ka la konkorda)

- ◆ Konsultor halibur no analiza prosesu sira, dadus pagamentu no reseita ba área sira asosiadu ho Timor-Leste nudar Termus Referénsia Grupu Serbisu nian define ona.
- ◆ Konsultor hatama relatóriu kumprimentu ba Grupu Serbisu EITI nian atu estuda; Grupu Serbisu EITI nian estuda relatóriu ne'e no haruka fila hikas relatóriu ne'e ba Konsultor atu halo klarifikasaun ruma no, bainhira presiza hadia formatu reportasaun nian atu bele tuir lolo'os rekizitu sira.
- ◆ Grupu Serbisu EITI simu formalmente (ka la simu) relatóriu ne'e.

4e. Publika no dissemina relatóriu kumprimentu EITI no hatama relatóriu ne'e ba Governu

- ◆ Relatóriu EITI nian tau iha web sites governu, EITI, no web site sira seluk; relatóriu EITI nian hetan kobertura maka'as iha meu komunikaun nasional.
- ◆ Grupu Serbisu EITI nian mos sei dezenvolve estratéjia disseminasaun alargadu ida ba relatóriu EITI nian.
- ◆ Sei fo'o oportunidade ba parte interesadu sira atu diskute, avalia, no interpreta rezultadu sira.

Objetivu Lima: Avaliasaun ba Implementasaun EITI

5a. Avaliasaun ba EITI

- ◆ Grupu Serbisu EITI nian sei hili avaliador ida hosi lista aprovalu ida nebé Sekretariadu Internasional EITI nian iha Oslo fo.
- ◆ Avaliador halo avaliasaun ba implementasaun EITI iha Timor-Leste tuir Guia Avaliasaun EITI nian, no hatama relatóriu avaliasaun ba Grupu Serbisu EITI nian, governu, no Diretoria EITI nian atu hetan aprovasaun (ka rejeisaun).

5b. Publikasaun no disseminasaun relatóriu avaliasaun EITI nian

- ◆ Relatóriu avaliasaun EITI tau ona iha web sites governu nian, EITI nian, no web site sira seluk; relatóriu avaliasaun EITI nian hetan kobertura maka'as iha meu komunikaun nasional.
- ◆ Grupu Serbisu EITI nian atu dezenvolve estratéjia disseminasaun ida ba relatóriu avaliasaun EITI nian. ❖

La'ó Hamutuk Haruka Karta ba Nasoens Unidas kona ba Justisa

UNMIT iha Timor-Leste fulan 18 tiha ona, maibe sira seidauk halo buat barak atu hapara impunidade ba crime boot durante tempu okupasaun Indonesia nian. Entaun, *La'ó Hamutuk* haruka karta ne'e ba Konsellu Seguransa ONU. Sira diskuti kona ba UNMIT loron 22 fulan Fevereriu, no membru balu tuir ami nia sujestaun atu dehan UNMIT tenke fo prioridade ba sira nia serbisu ba asuntu justisa.

La'ó Hamutuk

Institutu ba Analiza no Monitor ba Rekonstruksaun iha Timor-Leste

12 Feveireiru 2008

Konsellu Seguransa, Organizaasaun Nasoens Unidas
Nova Iorque, Estadus Unidus Amérika

Membru Konsellu Seguransa Nasoens Unidas nian mak ami respeitu:

Ami hahu hakerek karta ne'e ba ita boot sira molok asaun koko oho ami nia Prezidente no Primeiru Ministru horseik dader, ne'ebe hodi Alfredu Reinadu ba mate. Hahalok violentu sira ne'e, hanesan mos ho lei laek no violensia ne'ebe bele mosu husi ne'e, tuir mai se sublinha karta ne'e nia pontus sira tuir mai ne'e. Se Nasoens Unidas atu fo duni suporta efektivu ba Timor-Leste nudar nasaun ida ne'ebe demokratiku, kalma no seguru, ema ne'ebe halo krime iha tempu uluk, oras ne'e, no iha loron oin mai tenki simu responsabilidade.

Demokrasia, Regra Lei nian, no Sistema Judisial ida ne'ebe efisien mak esensial ba dame no estabilidade ne'ebe metin. Lolos nasaun hot-hotu konkorda ona katak ema sira ne'ebe halo krime kontra umanidade labele goza impunidade iha ne'ebe deit. Nasoens Unidas foti ona pasu barak iha tinan hirak liu ba ne'e atu implementa prinsipu sira ne'e.

Infelizmente pasu sira ne'e la la'ó iha Timor Leste. Maski nia mandatu mai husi Konsellu Seguransa, UNMIT kuaze la halo buat ida atu avansa justisa ba krime sériu sira ne'ebe halo iha Timor-Leste iha tinan 1999. Tanba ita boot sira atu diskuti kona ba UNMIT nia performa no futuru, ami husu ita atu enfatiza importansia husi parte ida husi UNMIT nia mandatu ne'e.

Ba tinan sia ne'ebe liu ona, sai klaru ona katak suporta internasional nian presija atu hetan akuntabilidade ba Krime kontra Umanidade no krime sériu seluk ne'ebe halao husi no iha dresaun ba forsa Indonesia nian iha Timor Leste entre tinan 1975 no 1999. Nasoens Unidas rekonhese ona ida ne'e desde tinan 2000, no fo prioridade ona ba krime sira ne'ebe halao durante tinan 1999, wainhira Nasoens Unidas entrega tiha ona responsabilidade seguransa rai laran nian ba forsa Indonezia.

Misaun Nasoens Unidas nian iha ne'e husi kedas – UNTAET, UNMISSET, UNOTIL, no agora UNMIT – iha mandatu ne'ebe menus atu suporta justisa, maski iha fallansu iha prosesu pararelu ne'ebe halao husi Indonezia no Timor Leste. Iha tinan 2005, Komisaun Peritus husi Nasoens Unidas identifika katak prosesu sira be la'ó to'o oras ne'e seidauk hakotu impunidade, katak mekanismu adisional sei presija tan.

Infelismamente, kompromisu tinan barak no falta inisiativa iha politika internasional nian limita UNMIT nia mandatu atu halo kompletu investigasaun ba krime sériu ne'ebe halo iha 1999, sem autoridade ba halo akujasaun ka prosegamentu. Knaar ne'ebe limitadu tebes la tuir buat ne'ebe presija, maibe ida ne'e deit mos durante fulan 18 ne'ebe liu ona UNMIT falla atu halao.

Semana kotuk, SRSG Atul Khare esplika ba ONG Timor-Leste sira katak ida ne'e mosu tanba UNMIT no Governu Timor Leste nia preokupasaun ba servisu seluk - seguransa, eleisaun, governu foun Timor Leste nian, orsamentu, nss. Se UNMIT iha atu asiste Governu Timor Leste iha setor bar-barak ne'ebe sai governu hot-hotu nia responsabilidade, nia tuir lolos bele halo hotu liu husi buat ida deit iha tempo ida nia laran. No se Timor Leste atu sai husi funu, okupasaun, no desorden pos konfliktu nian ba dame no estabilidade, nia laos presija atu implementa regra lei nian deit, maibe atu halo povu sira fiar katak regra lei nian sei lao duni.

Suporta internasional esensial atu hetan justisa ba krime internasioanl sira - no se UNMIT la halo buat ida exeptu responde deit ba inisiativa ida husi Timor-Leste, komudidade internasional soe ona nia responsabilidade moral, legal no historiku atu hakotu impunidade.

Wainhira ita diskuti kona ba UNMIT no desidi nia futuru iha Kinta Feira ne'e. Ami husu ita boot atu fo konsiderarasaun ba haforsa mandatu ba justisa. Ezemplu sira impunidade nian mak kauza ida ba problema barak husi Timor-Leste nia problema sira foin lalais ne'e: Fallansu atu lori Alfredo Reinado no ema sira ne'ebe tuir nia ba justisa, hahalok la fo importansia ba lei ne'ebe habelar iha foinsae sira ne'ebe la satisfeito, difikuldade ne'ebe UNPOL, ISF no PNLT hasoru wainhira servisu haforsa lei, konfiansa ne'ebe laiha ba sektor judisial ne'ebe hodi povu atu halao lei tuir sira nia hakarak rasik.

Iha pontu ne'ebe menus liu, ami espera ita sei enkoraja SRSG atu hala'o parte ida husi nia misaun ne'e ho espiritu ne'ebe makas. Se Nasoens Unidas hakiduk an atu realiza nia promesa ne'ebe kiik liu atu investiga krime sériu, oinsa nia espera atu hanorin Timor-Leste nia sistema judisial no prokuradoria atu haforsa regra lei nian?

Informasaun antesedente balu mak tuir mai ne'e. Ami mos refere ita ba "Justice for Timor-Leste Remains an Unfulfilled International Obligation" nudar funsaun informasaun nian ida ne'ebe ami hato'o ba Uniaun Interparlamentar tinan kotuk.

Iha Maio 2006, buat ne'ebe hatutan husi Impunidade sai momos ba ema hotu, wainhira Timor-Leste nakfera ba krize no regra lei nian ne'ebe la efektifu rekere governu Timor-Leste atu husu assistensia militar internasional nian. Nasoens Unidas no komunidadade internasional sira seluk rekonehese katak Timor-Leste nia tranzisaun atu sai nasaun ida rekere suporta ne'ebe kontinua, no katak assistensia sira ne'e balu to'o oras ne'e la'o sala ka la nato'on ona.

Iha Juñu 2006 ami nia organijasaun haruka sujestaun balu ba Konsellu Seguransa. Iha tempu ne'eba, ami hakerek:

Iha ona rekonhesimentu ne'ebe luan katak governu Indonezia, komunidadade Internasional, no governu Timor-Leste falla tiha ona atu asegura justisa ba krime kontra umanidade no krime sériu sira seluk ne'ebe halo durante okupasaun ilegal tinan 24 nia laran ne'ebe Indonezia hala'o ba Timor-Leste, ka ba prosentajen kiik deit husi krime sira ne'ebe halo durante Nasoens Unidas nia prezensa iha tinan 1999. Memo ne'e sei la deskreve impunidade ne'ebe lao hela ka frustrasun klean liu ne'ebe vitima husi krime sira ne'e sente tanba laiha akuntabilidade. Ida ne'e dokumentadu ona ho diak husi observador kualifikadu sira, inklui iha relatoriu Komisaun Peritus Nasoens Unidas no Komisaun Lialos, Simu-Malu no Rekonsiliaun Timor-Leste nian (CAVR). Relatoriu Final CAVR nian deskreve buat ne'ebe hatutan husi justisa ne'ebe laiha durante tinan barak nia laran ba violasaun kontra direitus umanus: "Impunidade sai metin ona" no "respeitu ba regra lei nian no orgaun nasaun nian sira ne'ebe responsabiliza ba nia administrasaun, pillar fundamental husi hari nasaun Timor Leste, sei nafatin sai fraku tebes iha kontekstu ida ne'e."

Ami konkorda no aumenta tan katak advokasia ne'ebe repete fila-fila husi Prezidente Xanana Gusmao no naiulun Timor-Leste sira seluk halo aat liu tan situasaun ida ne'e. Maski nune'e, Timor-Leste nia naiulun sira barak liu sei hanoin kona ba krime sériu sira ne'ebe halo ba sira nia ema iha tinan 24 nia laran, wainhira komunidadade internasional sai tilun ne'ebe diuk ba sira nia tanis husu tulun. Ita lebele hakfodak katak Timor-Leste sente labele hasán mes-mesak naha atu prosesa krime kontra umanidade ne'ebe halao husi sidadaun indonezia sira ne'ebe halao hodi governu Indonezia nia naran. Komunidadade Internasional iha obrigasaun ida ne'ebe seidauk halo hotu, no responsabilidade uluk liu tenki hela ba NU no laos husik ba Governu Timor-Leste nian. Buat sira ne'e, oin nusa mos, Krime kontra Umanidade.

Iha fulan hirak liu ba, konsekuensia rua husi failansu atu hamosu justisa sai momos: ema ne'ebe halo krime koko impunidade ba krime sira ne'ebe sériu, no vitima, lakon konfiansa katak sistema justisa sei halao nia knaar, foti problema ba sira nia liman rasik. Laiha abilidade bebeik husi sistema tribunal Timor Leste nian atu hasoru krime ne'ebe foin mosu sai hanesan obstaklu ida, maibe husik responsabilidade ba justisa ne'ebe UNTAET no nia susesor sira halo mak prolema ida ne'ebe boot liu, no buat rua ne'e hotu misaun ONU nian ne'ebe sei mai tenki responde. Re-estrutura fila fali forsa polisia nian sei rezolve deit parte balu husi seguransa ne'ebe kuran iha Timor-Leste. To'o iha fali konfiansa ne'ebe luan ba sistema judisial no regra lei nian, Timor-Leste nia dame no governu ne'ebe konstitusional sei hela nafatin iha perigu nia laran, tanba balu sei foti dalan ilegal ka prosesu ne'ebe sai husi konstituisaun atu hetan rikusoin ka poder.

Wainhira Konsellu Seguransa kria UNMIT ho rezolusaun 1704 iha Agostu 2006, ita boot reafirma nesesidade ba akuntabilidade ne'ebe kredivel ba violasaun sériu ba direitus umanus ne'ebe halo iha Timor-Leste iha tinan 1999, no simu relatoriu Sekretariu Jeral nian kona ba Justisa no Rekonsiliaun ba Timor-Leste iha 26 Jullu 2006 (S/2006/580), ... UNMIT sei iha mandatu tuir mai ne'e:

... (i) Ajuda iha implementasaun husi rekomendasaun sira ne'ebe relevante iha Relatoriu Sekretariu Jeral nian kona ba Justisa no Rekonsiliaun, inklui asisti Officio Prokurador Jeral Timor-Leste nian, liu husi estebelesimetu ba tim ida husi ema sira ne'ebe iha ona esperiensia iha investigasaun nian, atu kontinua funsaun investigativu husi Unidade Krime Sériu uluk nian, ho objektivu atu halo kompletu invetigasaun ba kazu ne'ebe boot liu husi violasaun sériu kontra direitus umanus ne'ebe halo iha rai ne'e iha 1999.

Relatoriu Sekretariu Jeral nian ba Konsellu Seguransa 17 Janeiru 2008 (S/2008/26) rekonhese (para 42) katak UNMIT halo buat uitoan teb-tebes atu realiza nia *responsabilidade ne'ebe limitadu teb-tebes ba justisa*, atu halo kompletu deit *investigasaun ba Krime Sériu ne'ebe halo iha 1999, maibe laos atu hato'o akujasaun ou halao julgamentu*. Relatoriu ne'e hato'o katak UNMIT "iha tempo badak sei asina akordu ida" ho governu Timor-Leste atu asesu dokumentu husi *Unidade Krime Sériu* uluk nian no katak sira "Komesa prepara planu sira atu halao *investigasaun*."

Iha sorumutu ida ho ONG Timor-Leste nian semana kotuk, SRSG Atul Khare hetan pergunta kona ba *akuntabilidade ba krime sira ne'ebe halo entre 1975 no 1999, tanba nia aponta kona ba regra lei nian iha ninia aprezentasaun, no katak Nasoens Unidas repete fila fila katak impunidade tenki labele moris*. Tanba sa mak han tempu to'o fulan 18 kedas atu to'o deit ba akordu ne'e?

Tuir mai ne'e ninia resposta ne'ebe ami hato'o iha ami nia liafuan:

Kona ba krime sira iha 1999, ita tenki hanoin fali situasaun iha tempu ne'ebe ha'u to'o iha Dezembru 2006. Iha *violensia lor-loron, laiha lei eleisaun nian ne'ebe hakerek ona, nss*. Ami nia *prioridade mak eleisaun ne'ebe la'o ho dame, estabilidade no seguransa*. Se UNMIT foka ona ba 1999, ne'e sei sai forsa ida ba *instabilidade*. Durante prosesu eleisaun nian, ami la foka ba *Unidade Krime Sériu* tanba ida ne'e sei bele sai fali asuntu politiku ida. Hafoin governu foun forma. Iha ne'e foin posivel atu to'o ba governu foun hafoin adopta tiha orsamentu geral (2008), ida ne'e aktualmente *negosiadu iha semana ne'en nia laran*. Hau sei dehan ba imi segredu ida: akordu foun ne'e sei assina iha loron 11 Feveireiru. Tim *Unidade Krime Sériu* nian iha fatin ona, nune'e sira bele komesa *servisu kedas ona*.

Wainhira ita boot sira hasoru malu iha loron hirak mai, ami enkoraja ita atu "enfatiza *importansia husi esforsu ne'ebe lao nafatin atu hetan akuntabilidade no justisa ba eventu 1999*" hanesan ita boot halo iha tinan kotuk. Ami mos hein katak ita sei hato'o laos deit ba UNMIT, maibe mos ba governu Timor Leste no *Indonezia, katak Justisa mak fundasaun essencial ba estabilidade rai ne'e nia iha loron oin mai*.

Obrigadu,



Santina Soares Maximus Tahu
Tim Koordinasaun, La'o Hamutuk

Berita Singkat: Program Pemerintah dalam Bidang Pertanian

Pada tanggal 19 Desember 2007, La'o Hamutuk mengorganisir pertemuan publik bulanannya, kali ini mengenai Program Pemerintah di bidang Pertanian. Tujuan dari pertemuan publik ini adalah untuk membagi informasi kepada publik tentang rencana pemerintah baru dalam bidang pertanian dan memfasilitasi diskusi antara pemerintah, masyarakat sipil serta akademis tentang apa yang mereka bisa lakukan.

Valentino Varela, Sekretaris Negara untuk Urusan Pangan, yang mewakili pemerintah. Pemerintah baru, menurutnya memiliki misi untuk menjadikan kementerian ini menjadi kementerian para petani yang akan melayani kepentingan semua petani dan menjamin keamanan pangan di Timor Leste. Arsenio Pereira, Koordinator Jaringan untuk Sustainability Pertanian Timor Leste (HASATIL) menghormati usaha untuk mewujudkan aman pangan sebagai salah satu hal positif dari keseluruhan program pemerintah tetapi dengan tegas merekomendasikan pemerintah untuk tidak hanya tergantung pada impor pangan dari luar negeri. Pemerintah harus berupaya sebaik mungkin dalam mewujudkan kedaulatan pangan dengan cara meningkatkan produksi pangan dalam

negeri berdasarkan pada tiga prinsip utama: Kebersinambungan Ekonomi, Ekologi dan Social Budaya. Dari sudut akademi, Mateus da Cruz, dekan Fakultas Pertanian Universitas Nasional, mengomentari pentingnya peningkatan produksi pangan —misalnya dengan cara menyediakan sarana yang memadai— tetapi menekankan juga bahwa kualitas produksi jangan sampai diabaikan sebab kuantitas tanpa kualitas akan sulit bersaing di pasaran.

Selama sesi tanya jawab, banyak hadirin dari masyarakat sipil mempertanyakan kecilnya anggaran pemerintah untuk kementerian pertanian dan perikanan untuk tahun 2008, terlebih jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa lebih dari 80% penduduk Timor Leste hidup dari pertanian. Sebagai jawaban, Varela mengatakan bahwa untuk tahun ini pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada penyelesaian krisis dalam negeri. Banyak dari masyarakat sipil dalam pertemuan publik ini juga mempertanyakan kebijakan membagi beras kepada pegawai negeri, dengan keprihatinan bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif kepada para pedagang, khususnya petani lokal, yang berasnya tidak akan laku terjual di pasaran. ❖

Editorial: Bank Dunia Merekomendasikan Jalan Neo-Liberal, Lagi

(lanjutan hari halaman 24)

Selanjutnya, transparansi di Timor-Leste jangan hanya terfokus kepada *pengelolaan* pendapatan Minyak, tetapi meliputi seluruh proses eksploitasi minyak. Misalnya, sebuah Kontrak Pembagian Produksi antara Timor-Leste dan perusahaan minyak sebaiknya tidak melarang perusahaan untuk menyebarkan informasi secara sukarela, ketetapan yang ada sekarang bertentangan dengan prinsip EITI. Oleh karena itu Dana Perminyakan dan mekanisme implementasinya tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian secara umum dalam hal transparansi dan tanggung jawab.

Laporan itu menghargai Dana Perminyakan dan prinsipnya untuk menyimpan uang untuk masa depan, karena pada suatu saat semua cadangan gas dan minyak Timor-Leste akan habis terpakai. Tetapi dari sisi lain, Pemerintah perlu membelanjakan pendapatan secara efektif. IFI melihat bahwa kapasitas pengeksekusian anggaran sangat lemah pada Pemerintah sebelumnya. Kapasitas yang lemah ini ditunjukkan dalam perencanaan proyek, proses tender dan bidding kontrak, dan juga dalam pengelolaan keuangan yang sangat terpusat. Ini membuat kemandekan dalam pengembangan ekonomi secara umum dan tidak berkembangnya sektor swasta di luar minyak. Oleh karena itu, untuk memperbaiki semua ini, IFI merekomendasikan beberapa langkah untuk mengeksekusi anggaran secara lebih efektif, seperti desentralisasi pengelolaan keuangan Pemerintah, termasuk proses tender, dan membangun kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan proyek.

Pendapatan Minyak bisa memperbesar Pengeluaran Publik

Walaupun pendapatan dari sektor minyak meningkat lebih cepat daripada yang diduga, pertumbuhan di sektor lain tidak ada kemajuan. Ini adalah masalah besar karena kebanyakan orang Timor bekerja di luar sektor minyak tanah dan kemandegan dalam sektor itu menyebabkan pengangguran meningkat. Maka, dalam laporannya IFI mempertimbangkan kembali ketidaksetujuan mereka sebelumnya pada pembelanjaan Pemerintah dan merekomendasikan, sebagai solusi jangka pendek, peningkatan pembelanjaan pada sektor publik untuk menyediakan pekerjaan dan pelayanan. Misalnya, Bank Dunia merekomendasikan pembangunan jaringan keselamatan sosial untuk memberikan dukungan segera pada masyarakat miskin dan bagian masyarakat yang rentan (*vulnerable*). Menurut laporan ini bisa dilakukan melalui menyediakan pekerjaan dengan upah rendah, pemberian uang tunai kepada orang cacat, dan pemberian makanan sekolah dan pemberian uang kepada keluarga yang beranak, dan “program pemberian sedikit uang, untuk membagikan sebagian kecil pendapatan minyak kepada masyarakat”

Ini bukan karena IFI setuju dengan pembelanjaan publik, tetapi karena mereka percaya bahwa, karena situasi sosial yang rentan, hanya mengandalkan investasi non minyak

tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, untuk jangka menengah dan panjang IFI percaya bahwa investasi luar negeri dan bisnis swasta akan menjalankan ekonomi, dan mereka mendorong Pemerintah untuk memotong pajak importasi dan pendapatan kepada para usahawan.

Pengelolaan Keuangan sendiri tidak memadai

Meskipun laporan ini menggarisbawahi beberapa persoalan penting, termasuk ketiadaan pertumbuhan ekonomi disektor non-minyak. *La'o Hamutuk* berpendapat bahwa laporan ini mengabaikan dampak dari ketergantungan minyak. Dengan pendapatan yang terbatas dari sektor non minyak, IFI beranggapan bahwa pendapatan minyak sekarang berlebih karena hal ini lebih tinggi dari yang diduga. Penekanan IFI kepada transparansi minyak di Timor-Leste mencerminkan bahwa dia memiliki perspektif sempit akan permasalahan kutukan sumber alam (*resource curse*), melainkan hanya memusatkan pada pengelolaan pendapatan. Walaupun ketiadaan transparansi adalah salah satu elemen dari kutukan ini, *La'o Hamutuk* sudah menulis tentang banyak elemen lainnya: perusahaan minyak yang rakus dan tak mengindahkan moral, kehancuran lingkungan, peraturan yang tidak efektif, pengabaian sektor di luar minyak, pengambilan keputusan yang tidak demokratis, ketergantungan pada bahan impor, keterlibatan lokal yang kecil dalam industri perminyakan, kegagalan perencanaan pertumbuhan penduduk, dll.

Perspektif yang terbatas ini, tercermin dalam perhatian pemerintah lama kepada pengelolaan pendapatan Pemerintah, gagal melihat implikasi yang lebih luas seperti yang tersebut di atas ini, dan tidak bisa menghasilkan kebijakan yang komprehensif yang bisa menguasai dampak tersebut dan bisa menyelamatkan Timor-Leste dari kutukan sumber alam. Meskipun kebanyakan rekomendasi dari laporan ini sebaiknya diterima oleh Pemerintah Timor-Leste sekarang, mereka seharusnya melakukan lebih banyak daripada Dana Perminyakan, dalam hal praktek dan penetapan perlindungan berdasarkan hukum.

Pembangunan Sektor Swasta di Timor-Leste

Persoalan penting lain yang dicakup dalam laporan ini adalah Pembangunan Sektor Swasta Timor-Leste. Bagian ini ditulis oleh Perusahaan Keuangan Internasional, yang memulai aktivitas di Timor-Leste pada tahun 2006 dan bertujuan untuk membantu Timor-Leste dalam mendukung sektor swasta dan meningkatkan investasi asing di Timor-Leste. Sebelum kedatangan IFC Bank Dunia bertanggung jawab atas promosi Pengembangan Sektor Swasta disini.

Menurut Bank Dunia pengembangan sektor swasta sangat penting bagi pengembangan ekonomi. Peran Pemerintah adalah untuk mengatur, sementara peran sektor swasta adalah untuk melakukan pembangunan. Keyakinan ini didasarkan atas politik neo-liberal dan kebijakan yang berorientasikan pasar bahwa sektor pribadi lebih efisien,

lebih efektif, kurang korup, dan lebih berkualifikasi daripada sektor publik.

Bank Dunia, IMF dan ADB sudah lama menganjurkan upaya-upaya untuk meningkatkan sektor swasta di Timor-Leste. Tahun lalu Bank Dunia menerbitkan naskah kerja (*Perusahaan, Buruh dan Ketrampilan di Daerah Kota Timor-Leste*) mengenai pengembangan sektor swasta di Timor-Leste, berdasarkan temuan dari “Peninjauan Perusahaan Daerah Kota 2004” dan “Laporan dalam Melakukan Usaha 2006”. Laporan yang terakhir ini menilai melakukan usaha swasta dengan mudah sebagai bagian dari penelitian di seluruh dunia, dan menemukan bahwa Timor-Leste adalah negara terburuk nomor dua. Penilaian ini berdasarkan atas berbagai faktor, seperti pendaftaran tanah, infrastruktur, pengadilan, prosedur birokrasi dan keamanan politik. Pemerintah yang lalu, di bawah Perdana Menteri José Ramos-Horta menggunakan laporan ini untuk menganjurkan reformasi pajak yang radikal. Dalam Laporan Melakukan Usaha 2008, Timor-Leste telah naik sampai ke urutan 168 dari 178 ekonomi yang diteliti, sedikit lebih baik dibanding tahun lalu.

Rekomendasi IFI

Dalam Laporan Singkat Pembangunan Ekonomi dan Sosial, IFC mengakui bahwa, dilihat dari konteks, adalah tidak realistis untuk menyandarkan diri pada sektor swasta dalam jangka pendek. Jadi, sektor publik seharusnya lebih banyak berperan. Tetapi, untuk pengembangan jangka panjang, IFC dan Bank Dunia percaya bahwa sektor swasta perlu berperanan lebih penting yang lebih banyak untuk pembangunan ekonomi di Timor-Leste. Pada saat yang sama mereka melihat faktor negatif seperti, ongkos yang tinggi waktu dan biaya untuk memulai bisnis, dan regulasi perburuhan yang diperketat. Oleh karena itu, Bank Dunia dan IFC merekomendasikan Pemerintah untuk mengambil tindakan dengan segera untuk menciptakan lingkungan yang sehat pada pembangunan sektor swasta. Rekomendasi dalam laporan singkat tentang Pembangunan Sosial dan Ekonomi, mengatakan: “Dilihat dari posisi keuangan dan kemungkinan yang menguntungkan (*oleh karena pendapatan minyak – redaksi*), mengurangi dan menyederhanakan tarif impor dan pajak pendapatan untuk ekonomi non-minyak (tetapi bukan ongkos pengguna dan peralatan) barangkali dibenarkan sebagai bagian dari pekerjaan umum untuk memperbaiki ketertarikan Timor-Leste sebagai tempat tujuan untuk investasi swasta”. Secara sederhana, perusahaan mesti bayar pajak yang rendah untuk barang

impor dan dalam melakukan usaha mereka. Selanjutnya, Bank Dunia merekomendasikan persetujuan Hukum Tanah dan amandemen Undang-undang Lembaga Komersial, Kitab Undang-undang Pendaftaran Komersial dan beberapa hukum investasi. Menurut Bank Dunia sistem hukum investasi terpisah yang sekarang ada, satu untuk investasi domestik dan satu untuk investasi asing, terlalu kompleks dan merekomendasikan untuk menyederhanakannya dan menggabungkan jadi satu. Mereka juga berpendapat bahwa harus diberi lebih banyak dukungan kepada inisiatif micro-finance, tetapi hanya atas syarat-syarat komersial dan oleh institusi perbankan dan micro-finance yang sudah tetap.

Rekomendasi akan berdampak buruk pada bisnis kecil secara jangka panjang

Kami setuju dengan Bank Dunia dan IFC bahwa pengangguran yang tinggi, kapasitas pelaksanaan anggaran belanja yang lemah, dan ketiadaan kerangka hukum yang penting adalah masalah-masalah serius di Timor-Leste, dan salah satu faktor dari krisis tahun lalu. Tapi, kami tidak setuju dengan rekomendasi Bank Dunia, yang terlalu memfokuskan pada pembuatan usaha secara murah. Komunitas usaha di Timor-Leste kebanyakan terdiri dari perusahaan kecil milik keluarga. Menurut La’o Hamutuk rekomendasi sekarang bermaksud untuk lebih menaikkan investasi asing daripada investasi domestik dan pada umumnya investasi asing yang sedikit bersangkut paut dengan masalah lokal.

Walaupun pajak yang lebih rendah menguntungkan investasi asing maupun domestik, perusahaan asing yang paling banyak akan menggunakan sistem ini. Di seluruh dunia banyak penelitian telah diadakan tentang dampak investasi asing pada pembangunan ekonomi lokal dan kesimpulan umumnya adalah bahwa di negara dengan pembangunan ekonomi rendah, seperti Timor-Leste, kenaikan jumlah perusahaan asing bisa mengakibatkan perusahaan lokal akan “tergeser keluar”. Khususnya di negara yang riskan untuk usaha, para investor asing biasanya menjaga usahanya dengan ketat dan selalu siap untuk meninggalkan negara itu secara cepat. Ini dicerminkan dalam cara mereka melakukan usaha, yang menggunakan buruh sementara dengan posisi rendah dan kebanyakan dana disalurkan ke luar negeri. Oleh karena itu, bahayanya adalah menciptakan lingkungan usaha dengan hanya sedikit uang yang menetes ke lingkungan setempat. ❖

Siapa di La’o Hamutuk?

Staf La’o Hamutuk: Yasinta Lujina, Inês Martins, Odete Monis, Charles Scheiner, Viriato Seac, Santana Soares, Tibor van Staveren, Maximus Tahu

Penerjemah: João Sarmiento, Budi Setyo

Dewan Penasehat: Joseph Nevins, Pamela Sexton, Adérito de Jesus Soares, Justino da Silva, Oscar da Silva

Pada bulan Agustus 2007, sementara Timor-Leste membentuk pemerintahan baru, Bank Dunia, Korporasi Keuangan Internasional (*International Finance Corporation - IFC*) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank - ADB*) menerbitkan “Laporan Singkat Ekonomi dan Sosial” untuk Timor-Leste. Laporan setebal 62 halaman dari Institusi-Institusi Pembiayaan Internasional (*International Financial Institutions - IFI*) ini meninjau kembali berbagai aspek pembangunan negara ini, dan memberi beberapa rekomendasi untuk pemerintahan yang baru. Menurut Catherine Anderson, Analis Operasional (Sistem Pemerintahan) dari Bank Dunia, Bank Dunia menggunakan laporan ini untuk menggarisbawahi masalah-masalah terkini dan memberikan dukungan kepada Pemerintah baru untuk meyelesaikannya. Fakta-fakta yang didiskusikan dalam laporan ini bukan hal baru; laporan itu mengumpulkan dan meringkas beberapa isu yang didiskusikan dalam dokumen Bank Dunia dan ADB sebelumnya.

Laporan itu diedarkan secara luas di Pemerintah, di antara para diplomat yang berada di Timor-Leste, dan kepada masyarakat. Walaupun Pemerintah baru di bawah Xanana Gusmão belum memberi respons secara formal, mereka rupanya sedang mengadopsi beberapa rekomendasi, tercermin dari kebijaksanaan umum Pemerintah untuk lima tahun ke depan. Persoalan dan rekomendasi yang didiskusikan dalam laporan ini, dan juga dalam naskah *Perusahaan, Pekerja dan Ketrampilan di Daerah Perkotaan di Timor-Leste*, dapat berdampak besar kepada arah perkembangan negara kita yang kecil ini. *La’o Hamutuk*, sebagai organisasi masyarakat di Timor-Leste ingin memberikan tinjauan kami kepada dua hal penting dalam dokumen tersebut: Perkembangan Minyak Tanah dan Perkembangan Sektor Swasta.

Pengelolaan Pendapatan Minyak

Pendapatan Minyak meliputi lebih dari 90% dari anggaran tahunan Pemerintah. Pemerintah Timor-Leste yang pertama telah mencoba menghindari masalah-masalah yang dialami banyak negara kaya sumber daya alam, khususnya dalam pemborosan uang dan korupsi yang merajalela. Norwegia menghindari masalah ini dengan menyimpan pendapatan gas dan minyak ke dalam Dana Perminyakan, dan Timor-Leste, meskipun sangat berbeda dengan Norwegia secara sejarah, ekonomi dan politik, meloloskan Undang-undang Dana Perminyakan pada tahun 2005 (*Buletin La’o Hamutuk*, Vol. 8, No. 1, Maret 2007).

Mengenai transparansi dan pertanggung jawaban, pengesahan Undang-undang Dana Perminyakan dipandang sebagai “model kerja terbaik internasional” dan pengelolannya “dirancang untuk menegakkan transparansi dan tanggung jawab.” Selanjutnya laporan menyatakan bahwa pengadopsian Hukum Dana Perminyakan, Model Pembagian Kontrak Produksi (*Production Shar-*

ing Contract - PSC), dan Hukum Perpajakan Minyak melengkapi kerangka hukum yang menentukan eksplorasi dan pengembangan sumber minyak tanah di Timor-Leste, dan hukum ini juga “sesuai dengan praktek internasional yang baik”, sama seperti komitmen Pemerintah kepada Inisiatif Transparansi Industri Bahan Baku (*Extractive Industries Transparency Initiative* atau EITI; bacalah artikel kami di halaman 12) dan pembuatan Kelompok Kerja EITI.

Tetapi, menurut pendapat *La’o Hamutuk*, beberapa hukum dan alat implementasi yang penting, seperti Undang-undang Minyak, Kontrak Pembagian Produksi (lihat *Buletin La’o Hamutuk* Vol. 6 No. 4 November 2005) dan berbagai rancangan regulasi untuk menyusun kembali sektor minyak tetap masih kurang transparan dan bertanggung jawab (lihat *Buletin La’o Hamutuk*, Vol. 8 No. 3 September 2007 dan Vol. 8 No. 2 Juni 2007).

(bersambung ke halaman 22)

Apakah La’o Hamutuk itu?

La’o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor-Leste yang memantau, menganalisa, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor-Leste dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La’o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La’o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, *La’o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf *La’o Hamutuk* baik itu staf Timor-Leste maupun internasional mempunyai tanggung jawab dan memperoleh gaji yang sama. Terakhir, *La’o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor-Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La’o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. *Buletin* dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La’o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La’o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor-Leste serta masyarakat internasional.